

**LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS) YANG BERASAL DARI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

2021

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	LATAR BELAKANG	1
A.2.	PROSEDUR	1
B.	PENYELIDIKAN	4
B.1.	URAIAN BARANG YANG DISELIDIKI	4
B.2.	INDUSTRI DALAM NEGERI	7
B.3.	PASAR DOMESTIK BJLAS	8
B.4.	PERHITUNGAN MARGIN DUMPING	9
B.4.1.	NILAI NORMAL	10
B.4.2.	HARGA ESKPOR	11
B.4.3.	MARJIN DUMPING	11
	a. Republik Rakyat Tiongkok	
	i. Guanxian Renze Composite Material Co., Ltd. (“Renze”)	11
	ii. Shandong Evangel Material Co., Ltd. (“Evangel”)	12
	iii. Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. (“YPC”)	13
	iv. Jiangyin Zongchen Steel Co., Ltd. (“JYZC”)	13
	v. Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. (“Ruifeng”)	14
	vi. Huimin Wanshun Energy Saving New Material Co., Ltd. (“Huimin”)	15
	vii. Eksportir Dan/Atau Eksportir Produsen Lainnya	16
	b. Vietnam	
	i. Nam Kim Steel Joint Stock Company (“Nam Kim”)	16
	ii. Hoa Sen Group (“HSG”)	17
	iii. Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (“Maruichi”)	18
	iv. Southern Steel Sheet Co., Ltd. (“SSSC”)	18
	v. Ton Dong A Corporation (“TDA”)	19
	vi. Tan Phuoc Khanh Trading and Manufacturing Coil Steel JSC (“TPK”)	20
	vii. Tay Nam Steel Manufacturing and Trading Co., Ltd. (“Tay Nam”)	20
	viii. Vina One Steel Manufacturer (“Vina One”)	21
	ix. Eksportir Dan/Atau Eksportir Produsen Lainnya	21
B.5.	KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI	21
B.6.	HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	24
B.6.1.	DAMPAK VOLUME	24
B.6.1.1.	ABSOLUT	24
B.6.1.2.	RELATIF	25

B.6.2. DAMPAK HARGA	26
B.6.2.1. <i>PRICE UNDERCUTTING</i>	26
B.7. FAKTOR LAIN	26
B.7.1. Konsumsi Nasional	26
B.7.2. Impor Negara Lain	27
B.7.3. Teknologi.....	27
B.8. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	27
B.8.1. Tanggapan Dari Trade Remedies Authority Of Vietnam Ministry of Industry and Trade.....	27
B.8.2. Tanggapandari Eksportir (HSG, NAM KIM, TAY NAM, VINA ONE, YPC, TPK, SSSC).....	31
B.8.3. Tanggapan dari Importir (Aplus Pacific).....	56
B.8.4. Tanggapan dari ASOSIASI (APBRI DAN ASBARINDO).....	60
C. KESIMPULAN	74
D. REKOMENDASI	74

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel:

Tabel 1. Uraian Pos Tarif Sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012	5
Tabel 2. Produksi Dalam Negeri BJLAS pada PP	7
Tabel 3. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar BJLAS	8
Tabel 4. Indikator Kinerja IDN	22
Tabel 5. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Penjualan Dalam Negeri	22
Tabel 6. Penjualan Dalam Negeri dan Laba Operasi	23
Tabel 7. Produksi, Kapasitas, Utilisasi Kapasitas dan Persediaan	23
Tabel 8. Produksi, Produktivitas, Tenaga Kerja, dan Upah	23
Tabel 9. Arus Kas, ROI, <i>Growth</i> , dan Kemampuan Meningkatkan Modal	24
Tabel 10. Volume Impor BJLAS	24
Tabel 11. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Domestik BJLAS	25
Tabel 12. Harga Jual BJLAS dan <i>Price Undercutting</i>	26
Tabel 13. Konsumsi Nasional	26
Tabel 14. Impor BJLAS	27

Gambar:

Gambar 1. Alur Proses Produksi BJLAS	6
--	---

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas impor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Vietnam pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope Indonesia). Pemohon merupakan industri dalam negeri yang memproduksi BJLAS yang berdasarkan BTKI 2017 masuk dalam pos tarif 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19 dan 7226.99.99.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 dan *Article 12.2 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti Dumping Agreement)* KADI menerbitkan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Anti Dumping atas produk BJLAS yang berasal dari RRT dan Vietnam yang akan menjadi dasar dalam rekomendasi KADI terkait pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk tersebut.

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai dengan PP 34 Pasal 7 ayat (1) dan *Article 5.5. Anti Dumping Agreement*, pada tanggal 7 Agustus 2019 KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh (RRT dan Vietnam) di Indonesia, tentang diterimanya permohonan penyelidikan anti dumping atas impor produk BJLAS yang diimpor atau berasal dari RRT dan Vietnam.
4. KADI menetapkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami pemohon, dan hubungan kausal antara keduanya, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2019 KADI melakukan inisiasi penyelidikan.
5. Eksportir dan/atau eksportir produsen yang diketahui dalam permohonan adalah:
 - a. RRT
 - a.1. Wuhan Iron & Steel Corporation.
 - b. Vietnam
 - b.1. Hoa Sen Group;
 - b.2. Ton Nam Kim;
 - b.3. Maruichi Sun Steel Joint Stock Company

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

6. Importir:
 - a. PT Blue Steel Industries;
 - b. PT Sukses Expamet;
 - c. Prima Indo Steel;
 - d. PT Great Fortune;
 - e. PT Aplus Pacific;
 - f. PT Karya Mandiri Semesta.

7. Pada tanggal 26 Agustus 2019, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping atas impor produk BJLAS yang berasal dari RRT dan Vietnam di Harian Bisnis Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan, mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner kepada industri dalam negeri, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.

8. Periode penyelidikan (PP) untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari 2016-Desember 2016 (P1), Januari 2017-Desember 2017 (P2), Januari 2018-Desember 2018 (PP), sedangkan untuk dumping menggunakan data periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 (PP).

9. Atas permintaan pihak yang berkepentingan, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner.

10. Pihak-pihak yang menyampaikan jawaban kuesioner:
 - a. RRT
 - a.1. Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd;
 - a.2. Jianguyin Zongcheng Steel Co., Ltd;
 - a.3. Huimin Wanshun Energy Saving New Material Co., Ltd;
 - a.4. Shandong Tangrong New Material Co., Ltd;
 - a.5. Shandong Vision International Trading Co., Ltd;
 - a.6. Changshu Minshine International Co., Ltd;
 - a.7. Shandong Huayun New Material Co., Ltd;
 - a.8. Shandong Hanglong Internatioanl Co., Ltd;

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

- a.9. Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd;
 - a.10. Shandong Evangel Material Co., Ltd;
 - a.11. Guanxian Renze Composite Material Co., Ltd; dan
 - a.12. Beijing Kewei Jianye Steel Co., Ltd.
 - b. Vietnam
 - b.1. Maruichi Sun Steel Joint Stock Company;
 - b.2. Hoa Sen Group;
 - b.3. Nam Kim Steel Joint Stock Company;
 - b.4. Tan Phuoc Khanh Trading & Manufacturing Coil Steel JSC;
 - b.5. Southern Steel Sheet Co., Ltd;
 - b.6. Pomina Flat Steel;
 - b.7. Hoa Phat Steel;
 - b.8. Vina One Steel Manufacturer;
 - b.9. Tong Dong A Corporation; dan
 - b.10. Tay Nam Steel Manufacturing and Trading Co., Ltd
 - c. Industri Dalam Negeri
 - c.1. PT NS BlueScope Indonesia
 - d. Importir
 - d.1. PT Sukses Expamet;
 - d.2. PT Aplus Pacific;
 - d.3. PT Leasen New Material Steel;
 - d.4. PT Wijaya Steelindo; dan
 - d.5. PT Bumi Lancang Kuning Pusaka
11. Atas jawaban kuesioner yang diterima tetapi tidak lengkap, KADI menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan jawaban (*deficiency letter*).
12. Terdapat perusahaan yang berasal dari RRT yaitu Shandong Tangrong New Material Co., Ltd., Shandong Vision Internasional Trading dan perusahaan yang berasal dari Vietnam yaitu Pomina Flat Steel serta Hoa Phat Steel yang diketahui tidak melakukan ekspor ke Indonesia selama PP, dengan demikian KADI menyatakan bahwa perusahaan tersebut bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan.
13. KADI telah melakukan pemeriksaan ke lokasi:
- a. Pemohon: PT. NS BlueScope Indonesia tanggal 8-10 Januari 2020.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

- b. Industri dalam negeri pendukung:
 - b.1. PT. Sunrise Steel tanggal 4-6 Desember 2020
 - b.2. PT. Saranacentral Bajatama, Tbk tanggal 4-6 Desember 2020
 - c. Eksportir/Eksportir Produsen di RRT:
 - c.1. Guanxian Renze Composite Material Co., Ltd. dan Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. tanggal 13-14 Januari 2020;
 - c.2. Shandong Evangel Material Co., Ltd. dan Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation tanggal 15-16 Januari 2020; dan
 - c.3. Beijing Kewei Jianye Steel Co., Ltd. dan Jiangyin Zongcheng Steel Co., Ltd. tanggal 17-18 Januari 2020.
 - d. Importir: PT. Wijaya Steelindo tanggal 16 Maret 2020.
14. Pada tanggal 30 Juli 2020 KADI menerbitkan Laporan Data Utama (*Essential Facts*) dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan.
15. Pada tanggal 18 Agustus 2020 KADI menyelenggarakan dengar pendapat (*Public Hearing*) secara daring dan pada tanggal 13, 24 dan 25 Agustus 2020 telah dilaksanakan dengar pendapat (*Specific Hearing*) secara daring dengan beberapa pihak yang berkepentingan.
16. Pada tanggal 27 Agustus 2020 KADI memperpanjang masa penyelidikan yang hal tersebut telah sesuai dengan pasal 9 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2011 dan *Article 5.10 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti Dumping Agreement)*.

B. PENYELIDIKAN

B.1. URAIAN BARANG YANG DISELIDIKI

17. Barang yang diselidiki adalah produk canai lantainya dari besi, baja bukan paduan atau baja paduan lainnya dengan lebar kurang dari 600 mm atau lebih, disepuh, dipalut atau dilapisi dengan aluminium-seng dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya atau tidak, dalam bentuk lembaran, gulungan, simpai, strip atau lainnya.
18. BJLAS yang diproduksi oleh IDN merupakan produk sejenis maupun menyerupai (*closely resembling*) dengan BJLAS yang diimpor dari RRT dan Vietnam karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakter fisik, komposisi kimia pelapis, kegunaan, proses produksi, komposisi kimia bahan baku CRC (Logam Dasar Induk), teknologi, dengan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

lebar kurang dari 600 mm atau lebih yang dilapisi atau disepuh dengan paduan aluminium dan seng dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm dalam bentuk lembaran, gulungan, simpai, strip atau lainnya.

19. Berdasarkan uraian barang diatas barang yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19 dan 7226.99.99 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017:

Tabel 1. Uraian Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017

No	Nomor Pos Tarif	Uraian Barang
	72.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.
		- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium:
	7210.61	-- Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng
		--- Mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya:
1.	7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
	72.12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.
	7212.50	- Disepuh atau dilapisi secara lain:
		-- Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng:
2.	7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
3.	7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; <i>universal plate</i>
4.	7212.50.29	--- Lain – lain
	72.25	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih
		- Dari baja silikon-listrik:
	7225.30	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan:
	7225.40	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan:
	7225.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>)
		- Lain-lain:
	7225.92	-- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
	7225.99	-- Lain-lain:
5.	7225.99.90	--- Lain-lain
	72.26	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm
		- Dari baja-silikon listrik
	7226.20	- Dari baja <i>high speed</i> :
		- Lain – lain:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

No	Nomor Pos Tarif	Uraian Barang
	7226.91	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
	7226.92	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>):
	7226.99	-- Lain – lain
		--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng
6.	7226.99.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain:
	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng
7	7226.99.99	---- Lain-lain

Proses Produksi

20. BJLAS diproduksi dengan menggunakan bahan baku baja gulungan yang hasil langsung pencanaian dingin (CRC) atau BJLAS polos yang berasal dari lokal maupun dari impor, Aluminium Ingot, Zinc Ingot dan bahan kimia lainnya untuk lapisan tipis pada permukaan BJLAS. IDN memproduksi BJLAS terutama dari CRC dengan alur proses produksi BJLAS terlihat sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Proses Produksi



Cleaning

Cold Rolled Coil (CRC) yang akan dilapis harus dibersihkan dari sisa-sisa *rolling oil* dan debu *Fe* pada saat proses pembuatan CRC, untuk memastikan proses pelapisan terjadi dengan baik. Proses *cleaning* atau pembersihan:

- alkali *cleaning section* → (stage 1-Alkali *spray* dan diikuti oleh “*rotary abrasive brushing*” yang kemudian masuk lagi ke stage 2- Alkali *spray*)
- *hot water rinse*→ untuk membersihkan sisa-sisa alkali diatas permukaan strip (CRC)
- *air blower*→ pengeringan
- *Non Oxidation Furnace* (NOF) → dimana semua sisa *rolling oil* ataupun kontaminant lainnya akan dibakar.

Annealing

Annealing proses strip CRC yang sudah bersih akan melewati *radiant tube furnace* (RTF) untuk membentuk sifat mekanis yang diinginkan apakah sebagai produk yang “*soft*” atau yang “*hard*”. Proses ini merupakan proses yang kontinu (*continuous process*).

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Metal Coating

Proses pelapisan dilakukan di dalam bak atau pot “*molten metal*” dengan paduan Aluminium dan Zinc. Ketebalan dari lapisan metal akan dikontrol oleh sistem yang terdiri dari sepasang tiupan udara dengan tekanan tinggi (*air jet system*). Tiupan *ambient* udara dengan menggunakan *blower system* digunakan untuk mendinginkan lapisan metal Aluminium dan Zinc (*solidified metal*), dan pendinginan akhir dengan menggunakan *spray air* dan masuk kedalam bak air yang disebut *water quench tank*.

Surface conditioning and levelling

Strip yang sudah dilapis metal akan melewati “*surface conditioning mill*” dan “*leveling mill*” untuk perlakuan kerataan permukaan sebelum dilapis lapisan *chemical* (lapisan *passivation* dan lapisan resin dilakukan dengan menggunakan *roll*) sebagai “*protective coating*” pada lapisan permukaan dimana kemudian akan dikeringkan dengan menggunakan oven.

Exit Section

Proses penggulungan produk jadi dan pengambilan *sample* untuk pemeriksaan kualitas.

Kegunaan

Kegunaan akhir BJLAS antara lain sebagai material bahan bangunan, seperti rangka atap, rangka dinding, rangka lantai, rangka plafon, rangka partisi, hollow, penutup atap, penutup dinding. Namun ada beberapa jenis kegunaan khusus lainnya dari baja paduan/alloy steel yang ditambahkan boron dapat digunakan untuk industri otomotif sebagai material bahan otomotif seperti kendaraan yang besar seperti bis.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

Tabel 2. Produksi Dalam Negeri BJLAS pada PP

Industri Dalam Negeri	Persentase (%)
Produksi pemohon:	
PT NS BlueScope Indonesia	34
Produksi IDN lainnya	66
Total produksi seluruh industri dalam negeri	100

Sumber: Data IZASI, pemohon dan idn lainnya.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Standing Petitioner

21. Berdasarkan tabel di atas, total produksi pemohon sebesar 34% dari total produksi nasional dan pemohon juga mendapatkan dukungan dari IDN lainnya yang memiliki total produksi dengan presentase sebesar 66%, dengan demikian Pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan *Article 5.4 Anti Dumping Agreement* dan PP 34 tahun 2011 pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 ayat (1) untuk mengajukan permohonan penyelidikan antidumping.

B.3. PASAR DOMESTIK BJLAS

22. Berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN *Trade in Goods Agreement* dan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China *Free Trade Area*, besaran tarif preferensi untuk impor BJLAS dari Vietnam adalah 0% dan dari RRT adalah 12,5%, dan pada tahun 2018 besaran tarif untuk nomor HS 7210.6111 yang berasal dari RRT sebesar 5% dan besaran tarif untuk HS 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19 dan 7226.99.99 yang berasal dari RRT sebesar 0%.

Tabel 3. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar BJLAS

No	Keterangan	Satuan	Index			
			2016	2017	2018	Tren (%)
1	Penjualan IDN	MT	18	17	12	(20)
2	Penjualan idn lainnya	MT	24	24	23	(2)
3	RRT	MT	16	19	31	38
	Vietnam	MT	36	31	28	(12)
	Impor Dumping:	MT	52	50	59	7
4	Impor Negara lainnya	MT	6	9	6	2
5	Konsumsi Nasional*	MT	100	100	100	-
	Konsumsi Nasional**	MT	100	120	142	19

Sumber: IDN, IZASI, dan BPS, diolah.

Catatan: *) merupakan *share pangsa pasar* dimana data konsumsi nasional sebagai data acuan

**) merupakan *perkembangan konsumsi nasional* yang menggunakan data tahun 2016 sebagai data acuan perbandingan

23. Dari tabel di atas terlihat bahwa pada periode periode penyelidikan konsumsi nasional produk BJLAS mengalami peningkatan dengan tren sebesar 19%. Pada periode yang sama pangsa pasar penjualan IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar -20%,

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

namun sebaliknya impor negara lainnya naik dengan tren sebesar 2% dan impor dumping mengalami peningkatan dengan tren sebesar 7%.

B.4. PERHITUNGAN MARJIN DUMPING

24. Dalam melakukan perhitungan marjin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner produsen, eksportir produsen, atau eksportir yang diselidiki. Marjin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara harga normal dengan harga ekspor pada saat penyerahan dan tingkat perdagangan yang sama (eks-pabrik/*ex-factory*).
25. **Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Uji Profitabilitas**
KADI pada umumnya menerima pengalokasian biaya yang dilakukan oleh produsen, eksportir produsen, atau eksportir yang diselidiki dalam rangka pembebanan biaya dalam produk yang diselidiki, sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, biaya penjualan dan administrasi umum yang didukung oleh data dalam laporan keuangan. Namun, apabila pengalokasian biaya tersebut dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, maka dilakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut akan disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.
26. **Marjin Dumping atas Perusahaan yang Terafiliasi**
Produsen, eksportir, atau eksportir produsen yang tergabung dalam satu grup perusahaan yang sama (terafiliasi) akan mendapatkan marjin dumping individual yang sama dengan perusahaan afiliasinya. Sedangkan eksportir (non-produsen) yang tidak terafiliasi dengan eskportir produsen atau produsen tidak mendapatkan marjin dumping individual.
27. **Marjin Dumping atas Perusahaan Lainnya (*Residual Duty*)**
Penetapan marjin dumping atas perusahaan lainnya (*residual duty*) dilakukan berdasarkan tingkat kerjasama perusahaan yang kooperatif dari suatu negara, dengan perbandingan volume ekspor perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- a. *Residual duty* ditetapkan berdasarkan marjin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan untuk tingkat kerjasama tinggi.
 - b. *Residual duty* ditetapkan berdasarkan marjin dumping dari nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan untuk tingkat kerjasama rendah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Berdasarkan hasil penyelidikan, diperoleh tingkat kerjasama dari RRT sebesar 46% dan Vietnam sebesar 98%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama dari RRT menunjukkan tingkat kerjasama yang rendah, sedangkan dari Vietnam menunjukkan tingkat kerja sama yang tinggi.

28. Perhitungan marjin dumping terhadap produsen, eksportir, atau eksportir produsen yang kooperatif disampaikan secara terpisah kepada masing-masing produsen, eksportir, atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

B.4.1. NILAI NORMAL

29. Nilai normal masing-masing eksportir dan/atau eskportir produsen responden, secara umum ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari transaksi penjualan domestik pada perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*) selama periode PP. Data transaksi penjualan domestik yang dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah apabila volume penjualan domestik jumlahnya minimum 5% dari volume penjualan ekspor ke Indonesia. Tingkat profitabilitas penjualan domestik digunakan dalam penentuan *ordinary course of trade*. Apabila volume penjualan yang menguntungkan diatas 80% dari total volume penjualan domestik maka data seluruh transaksi penjualan dapat digunakan dalam menghitung nilai normal. Apabila volume penjualan yang menguntungkan antara 20-80% total volume penjualan domestik maka hanya data transaksi penjualan yang menguntungkan saja yang digunakan dalam menghitung nilai normal. Sedangkan apabila volume penjualan yang menguntungkan dibawah 20% total volume penjualan domestik maka data transaksi penjualan tidak bisa digunakan dalam menghitung nilai normal sehingga perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode konstruksi.
30. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*) barang yang diselidiki, dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan. Secara umum *allowances* diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).
31. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*) berdasarkan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

biaya produksi tipe barang tersebut, biaya penjualan, biaya umum dan biaya administrasi domestik, serta keuntungan yang wajar.

B.4.2. HARGA EKSPOR

32. Harga ekspor bagi produsen, eksportir produsen responden, ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama periode PP yang telah dikurangi dengan *allowances* yang dapat diterima dan biaya lain terkait dengan penjualan langsung yang diajukan dan diyakini kebenarannya. Harga ekspor dilakukan pada saat penyerahan dan tingkat perdagangan yang sama.

B.4.3. MARJIN DUMPING

33. Analisa perhitungan margin dumping masing-masing perusahaan di negara yang dituduh adalah bersifat sementara dan hanya berdasarkan jawaban kuesioner, jawaban *deficiency letter* dan data yang dimiliki KADI.

a. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

i. Guanxian Renze Composite Material Co., Ltd (“Renze”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Renze memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki ke pasar domestik namun dalam hal penjualan ekspor ke Indonesia melalui *unrelated trader* yaitu Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd (Kewei) dan tidak terdapat *exclusive agreement* antar kedua perusahaan, dimana Kewei sebagai *unrelated trader* mendapatkan pemasok tidak hanya dari Renze tetapi juga dari eksportir produsen lainnya.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*).

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor perusahaan ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor ekspabrik.

Marjin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 10,05% dari nilai CIF.

ii. **Shandong Evangel Material Co., Ltd (“Evangel”)**

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Evangel memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki ke pasar domestik namun dalam hal penjualan ekspor ke Indonesia melalui *unrelated trader* yaitu Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd (Kewei) dan tidak terdapat *exclusive agreement* antar kedua perusahaan, dimana Kewei sebagai *unrelated trader* mendapatkan pemasok tidak hanya dari Renze tetapi juga dari eksportir produsen lainnya.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*).

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor perusahaan ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor ekspabrik.

Marjin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 7,40% dari nilai CIF.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

iii. Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. (“YPC”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI dapat menerima beberapa tanggapan dan penjelasan perusahaan. Adapun penjelasan metodologi perhitungan margin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa YPC memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor dan sebagian dari penjualan domestik juga dilakukan oleh perusahaan afiliasi yaitu Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation. Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation bertanggung jawab atas penjualan YPC untuk wilayah China bagian utara. Perusahaan tersebut hanya menjual ke pasar domestik China. YPC melakukan penjualan ekspor ke Indonesia melalui *trader* non afiliasi yang berada di Singapura yaitu Chin Fong Metal Pte. Ltd.

Nilai Normal

Terdapat 209 tipe barang (KKB) yang di jual di pasar domestik, dimana hanya 1 diantaranya merupakan tipe barang yang di ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Data menunjukkan tingkat profitabilitas penjualan 1 KKB tersebut diatas 80%, sehingga perhitungan nilai normal berdasarkan seluruh penjualan perusahaan.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor YPC ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Margin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 23,55% dari nilai CIF.

iv. Jianguyin Zongchen Steel Co., Ltd (“JYZC”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan dan penjelasan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

perusahaan. Adapun penjelasan metodologi perhitungan margin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa JYZC memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik JYZC lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik JYZC digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut terdapat transaksi penjualan yang menguntungkan lebih besar dari 80% sehingga untuk transaksi tersebut digunakan seluruhnya, transaksi dengan keuntungan antara 20% sampai 80% sehingga hanya transaksi penjualan yang menguntungkan yang dijadikan dasar perhitungan nilai normal, dan transaksi yang dijual rugi serta transaksi yang tidak dijual di pasar domestik perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor JYZC ke Indonesia selama periode penyelidikan (PP). KADI menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Margin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 7,20% dari nilai CIF.

v. Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. (“Ruifeng”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Ruifeng memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor. Untuk penjualan pasar ekspor, Ruifeng mempunyai 2 (dua) perusahaan *trader* afiliasi yaitu Changshu Minshine International Co., Ltd. (“Minshine”) dan Shandong Hanglong International Trading Co., Ltd. (“Hanglong”),

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

namun kedua perusahaan tersebut tidak melakukan penjualan di pasar domestik. Oleh karena itu, dalam menghitung margin dumping untuk Ruifeng menggunakan metode rata-rata tertimbang dari Ruifeng, Minshine dan Hanglong.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik Ruifeng lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik Ruifeng digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut terdapat transaksi penjualan yang menguntungkan lebih besar dari 80% sehingga untuk transaksi tersebut digunakan seluruhnya, dan terdapat pula transaksi yang tidak dijual di pasar domestik sehingga perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor Ruifeng, Minshine dan Hanglong ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor yang dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Margin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor ketiga perusahaan tersebut dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 3,07% dari nilai CIF.

vi. Huimin Wanshun Energy Saving New Material Co., Ltd. (“Huimin”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Huimin memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik Huimin lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik Huimin digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut, diketahui bahwa seluruh KKB yang diekspor ke Indonesia tidak dijual di pasar domestik sehingga perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor Huimin ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor dari kuesioner dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 3,78% dari nilai CIF

vii. Eksportir Dan/Atau Eksportir Produsen Lainnya

Berdasarkan hasil penyelidikan, tingkat kerjasama perusahaan di RRT adalah rendah sebesar 46%, sehingga perhitungan marjin dumping untuk eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya di RRT dilakukan dengan menggunakan nilai normal tertinggi dan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif, yaitu sebesar 55,43 % dari nilai CIF.

b. Vietnam

i. Nam Kim Steel Joint Stock Company (“Nam Kim”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI dapat menerima beberapa tanggapan dan penjelasan perusahaan. Adapun penjelasan metodologi perhitungan margin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Nam Kim memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik Nam Kim lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik Nam Kim digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut tidak terdapat transaksi yang menguntungkan lebih dari 20% sehingga dalam menentukan nilai normal digunakan metode konstruksi.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor Nam Kim ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Margin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 13,00% dari nilai CIF.

ii. Hoa Sen Group

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI dapat menerima beberapa tanggapan dan penjelasan perusahaan. Adapun penjelasan metodologi perhitungan margin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa HSG memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*).

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor perusahaan ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor dari kuesioner dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Margin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar **5,34%** dari nilai CIF.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

iii. Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (“Maruichi”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Maruichi memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*)

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor perusahaan ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor dari kuesioner dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 18,30% dari nilai CIF.

iv. Southern Steel Sheet Co., Ltd (“SSSC”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan margin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI tidak dapat menerima tanggapan dan penjelasan perusahaan. Adapun penjelasan metodologi perhitungan margin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, SSSC memproduksi barang yang diselidiki dan melakukan penjualan baik secara domestik maupun ekspor secara mandiri.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik SSSC lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik Nam Kim digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut tidak

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

terdapat transaksi yang menguntungkan lebih dari 20% sehingga dalam menentukan nilai normal digunakan metode konstruksi.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor SSSC ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran marjin dumping sebesar 49,20% dari nilai CIF.

v. Ton Dong A Corporation (“TDA”)

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa TDA memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik TDA lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik TDA digunakan dalam perhitungan nilai normal. Seluruh transaksi domestic TDA dijual menguntungkan lebih dari 80% sehingga seluruh transaksi digunakan di dalam perhitungan.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor TDA ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran marjin dumping sebesar 3,01% % dari nilai CIF.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

vi. Tan Phuoc Khanh Trading and Manufacturing Coil Steel JSC (“TPK”)

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa TPK memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*).

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor perusahaan ke Indonesia selama periode penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor dari kuesioner dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran marjin dumping sebesar 7,29% dari nilai CIF.

vii. Tay Nam Steel Manufacturing and Trading Co., Ltd. (“Tay Nam”)

Menindaklanjuti tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan marjin dumping, dengan ini disampaikan bahwa KADI dapat menerima beberapa tanggapan dan penjelasan perusahaan. Adapun penjelasan metodologi perhitungan marjin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Tay Nam memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor. Tay Nam memiliki hubungan afiliasi dengan Vina One yang juga sebagai eksportir barang yang diselidiki di negara Vietnam, akan tetapi dalam penjualan ke Indonesia Tayname melakukannya dengan mandiri. Vina One dalam periode investigasi tidak memproduksi barang yang diselidiki, sehingga dalam penentuan marjin dumping Marjin Dumping dari Vina one akan mengikuti marjin dumping dari Tay Nam.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik Tay Nam lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga data penjualan domestik Tay Nam digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari 3 KKB yang identik terhadap penjualan ke Indonesia hanya 1 KKB yang dijual dengan persentase keuntungan diatas 80%, sehingga untuk transaksi tersebut seluruh transaksinya digunakan dalam perhitungan sedangkan 2 KKB sisanya dilakukan metode konstruksi karena KKB yang dijual ke Indonesia tidak dijual di pasar domestik Vietnam.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor Tay Nam ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor dari kuesioner dikurangi dengan allowances yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran marjin dumping sebesar 11,75% dari nilai CIF

viii. Vina One Steel Manufacturer (“Vina One”)

Diketahui dalam penyelidikan Vina One tidak memproduksi barang sejenis pada periode investigasi, sehingga barang yang dijual ke Indonesia adalah berasal dari perusahaan afiliasinya yaitu Tay Nam. Sehingga dalam penentuan marjin dumping perusahaan Vina One akan mengikuti marjin dumping Tay Nam.

ix. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

Berdasarkan hasil penyelidikan, tingkat kerjasama perusahaan di Vietnam adalah tinggi (98%). Dengan demikian, penetapan marjin dumping untuk eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya di Vietnam dilakukan berdasarkan marjin dumping tertinggi perusahaan yang kooperatif di Vietnam, yaitu sebesar 49,20% dari nilai CIF.

B.5. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

34. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka di bawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks. Berikut ini adalah data indikator kinerja IDN selama Periode Penyelidikan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Tabel 4. Indikator Kinerja IDN

No.	Indikator	Satuan	(Indeks)			
			2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Penjualan dalam negeri	MT	100	114	91	(4)
2.	Penjualan dalam negeri	USD	100	134	113	6
3.	Laba Operasi	USD	100	118	(58)	-
4.	Harga dalam negeri	USD/MT	100	117	123	11
5.	Market Share	%	100	95	64	(20)
6.	Produksi	MT	100	111	87	(7)
7.	Produktivitas	MT/Org	100	116	92	(4)
8.	Kapasitas	MT	100	100	100	-
9.	Utilisasi Kapasitas	%	100	111	87	(7)
10.	Persediaan	MT	100	72	82	(9)
11.	Tenaga kerja	Org	100	96	94	(3)
12.	Upah	IDR	100	101	101	1
13.	Arus kas*	USD	100	19	62	(21)
14.	ROI*	%	100	100	(25)	-
15.	Growth*	%	100	95	(132)	-
16.	Kemampuan meningkatkan modal*	%	100	90	89	(6)

Sumber: IDN, diolah.

*) Merupakan data untuk seluruh produk

35. Tabel di atas merupakan indikator kinerja ekonomi IDN yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian yang disampaikan pada resital 36 - 40.

Tabel 5. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar IDN, dan Penjualan Dalam Negeri

No.	Indikator	Satuan	Indeks			
			2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Konsumsi Nasional	MT	100	120	142	19
2.	Pangsa Pasar IDN	%	18	17	12	(20)
3.	Penjualan Dalam Negeri	MT	100	114	91	(4)

Sumber: IDN, diolah.

36. Terlihat pada tabel di atas, konsumsi nasional terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan tren sebesar 19% selama P1 - PP. Meskipun begitu, peningkatan konsumsi nasional tersebut tidak dinikmati oleh IDN dimana pangsa pasar IDN selama periode tersebut justru mengalami penurunan dengan tren sebesar -20%. Penjualan domestik IDN dalam periode tersebut terus mengalami penurunan dengan tren sebesar -4%. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa IDN mengalami penurunan pangsa pasar dan penjualan yang disebabkan karena adanya tekanan dari barang impor terutama barang impor yang mengandung dumping.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Tabel 6. Penjualan Dalam Negeri dan Laba Operasi

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Penjualan Dalam Negeri	MT	100	114	91	(4)
2.	Penjualan Dalam Negeri	USD	100	134	113	6
3.	Laba Operasi	USD	100	118	(58)	-

Sumber: IDN, diolah.

37. Terlihat pada tabel di atas, selama periode penyelidikan meskipun nilai penjualan dalam negeri mengalami peningkatan dengan tren sebesar 6% namun sebaliknya volume penjualan dalam negeri mengalami penurunan dengan tren sebesar -4%. Kinerja negatif juga terlihat dari indikator laba operasi perusahaan yang mencatatkan hasil negatif pada tahun investigasi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon mengalami kerugian.

Tabel 7. Produksi, Kapasitas, Utilisasi kapasitas dan Persediaan

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Produksi	MT	100	111	87	(7)
2.	Kapasitas	MT	100	100	100	-
3.	Utilisasi Kapasitas	%	100	111	87	(7)
4.	Persediaan	MT	100	72	82	(9)

Sumber: IDN, diolah.

38. Pada tabel di atas terlihat bahwa seiring dengan penurunan penjualan dalam negeri pada periode penyelidikan yang menyebabkan persediaan IDN meningkat pada tahun 2018 dan pada saat yang bersamaan kinerja produksi IDN juga mengalami penurunan dengan tren sebesar -7% dan utilisasi kapasitas mengalami penurunan dengan tren sebesar -7%. Hal ini terlihat bahwa kinerja produksi Pemohon telah terganggu akibat impor dumping negara tertuduh sehingga Pemohon terpaksa menurunkan produksinya.

Tabel 8. Produksi, Produktivitas, Tenaga Kerja, dan Upah

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Produksi	MT	100	111	87	(7)
2.	Produktivitas	MT/Org	100	116	92	(4)
3.	Tenaga kerja	Org	100	96	94	(3)
4.	Upah	IDR	100	101	101	1

Sumber: IDN, diolah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

39. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada periode penyelidikan produksi IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar -7% hal ini juga berdampak terhadap penurunan produktivitas IDN sebesar -4% sehingga menyebabkan IDN mengurangi tenaga kerjanya dengan tren sebesar -3%, sedangkan disaat yang bersamaan upah IDN tetap stabil. Oleh karena itu terlihat bahwa Pemohon terpaksa menurunkan kinerjanya yang tidak hanya menurunkan produksi akan tetapi sampai mengurangi jumlah tenaga kerjanya guna untuk dapat mengimbangi harga impor yang mengandung dumping.

Tabel 9. Arus Kas, ROI, Growth dan Kemampuan Meningkatkan Modal

						(Indeks)
No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Arus kas*	USD	100	19	62	(21)
2.	ROI*	%	100	100	(25)	-
3.	Growth (Asset)*	%	100	95	(132)	-
4.	Kemampuan meningkatkan modal*	%	100	90	89	(6)

Sumber: IDN, diolah.

*) Merupakan data untuk seluruh produk

40. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan arus kas, ROI, *growth* dan kemampuan meningkatkan modal IDN terus mengalami penurunan.
41. Berdasarkan resital 36-40 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan yaitu 2016-2018 IDN terus mengalami penurunan kinerja ekonominya yang terlihat pada indikator penjualan dalam negeri, *market share*, produksi, produktivitas, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, arus kas, ROI, *growth* dan kemampuan meningkatkan modal.

B.6. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.6.1. DAMPAK VOLUME

B.6.1.1. ABSOLUT

Tabel 10. Volume Impor BJLAS

Negara	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
RRT	MT	144.693	200.039	393.884	65
Vietnam	MT	318.682	331.824	354.516	5
Total Impor Dumping:	MT	463.375	531.863	748.400	27
Impor Negara lainnya	MT	54.740	95.395	81.544	22
Total Impor	MT	518.115	627.257	829.944	27

Sumber: BPS, diolah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

42. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan total impor BJLAS meningkat dengan tren sebesar 27%, disaat yang bersamaan impor yang berasal dari negara dituduh dumping mengalami peningkatan sebesar 27% dimana impor dari Vietnam meningkat sebesar 5% dan impor dari RRT meningkat sangat signifikan dengan tren sebesar 65%, dan impor yang berasal dari negara lainnya meningkat sebesar 22%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor BJLAS dari negara yang tertuduh dumping telah membanjiri pasar domestik Indonesia dan Pemohon sangat dirugikan akibat adanya impor barang yang mengandung dumping tersebut.

B.6.1.2. RELATIF

Tabel 11. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Domestik BJLAS

No	Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
1	Penjualan IDN	MT	18	17	12	(20)
2	Penjualan idn lainnya	MT	24	24	23	(2)
3	RRT	MT	16	19	31	38
	Vietnam	MT	36	31	28	(12)
	Impor Dumping:	MT	52	50	59	7
4	Impor Negara lainnya	MT	6	9	6	2
5	Konsumsi Nasional*	MT	100	100	100	-
	Konsumsi Nasional**	MT	100	120	142	19

Sumber: IDN, IZASI, dan BPS, diolah.

Catatan: *) merupakan share pangsa pasar dimana data konsumsi nasional sebagai data acuan

**) merupakan perkembangan konsumsi nasional yang menggunakan data tahun 2016 sebagai data acuan perbandingan

43. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan konsumsi nasional BJLAS mengalami peningkatan dengan tren sebesar 19%. Pada periode tersebut pangsa pasar IDN justru mengalami penurunan dengan tren sebesar -20% sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar impor dumping justru mengalami peningkatan dengan tren sebesar 7%. Di sisi lain impor yang berasal dari Negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2%. Dapat disimpulkan peningkatan konsumsi nasional tidak dapat dinikmati oleh IDN karena pangsa pasarnya lebih dinikmati oleh negara yang melakukan dumping.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

B.6.2. DAMPAK HARGA

B.6.2.1 PRICE UNDERCUTTING

Tabel 12. Harga Jual BJLAS dan Price Undercutting

				(Indeks)
No	Keterangan	2016	2017	2018
1	Harga Jual Pemohon	100	100	100
2	Harga Impor:			
	RRT	79	82	85
	Vietnam	71	78	82
3	Price Undercutting:			
	RRT	21	18	15
	Vietnam	29	22	18

Sumber: BPS dan IDN, diolah.

*) Harga impor RRT dan Vietnam adalah rata-rata tertimbang data impor BPS, THC, dan transportasi.

44. Dari tabel di atas terlihat bahwa pada selama periode penyelidikan harga jual impor yang berasal dari RRT dan Vietnam selalu berada di bawah harga jual IDN. Dengan kondisi tersebut jelas sekali terlihat bahwa IDN tidak dapat bersaing dengan barang impor yang mengandung dumping dikarenakan harga jual dari negara tersebut selalu berada di bawah harga jual IDN (*price undercutting*).

B.7. FAKTOR LAIN

B.7.1. Konsumsi Nasional

Tabel 13. Konsumsi Nasional

					(Indeks)
Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Tren%
Konsumsi Nasional	MT	100	120	142	19
Penjualan IDN	MT	100	114	91	(4)

Sumber: IDN, BPS, diolah.

45. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada periode penyelidikan konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 19%. Namun sebaliknya penjualan IDN malah mengalami penurunan dengan tren sebesar -4%. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa kenaikan konsumsi nasional bukannya dinikmati oleh IDN, justru yang lebih menikmati adalah barang impor yang mengandung dumping yang berasal dari negara RRT dan Vietnam.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

B.7.2. Impor Negara Lain

Tabel 14. Impor BJLAS

Negara	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
RRT	MT	144.693	200.039	393.884	65
Vietnam	MT	318.682	331.824	354.516	5
Total Impor Dumping:	MT	463.375	531.863	748.400	27
Impor Negara lainnya	MT	54.740	95.395	81.544	22
Total Impor	MT	518.115	627.258	829.944	25

Sumber: BPS, diolah.

46. Pada tabel di atas terlihat bahwa total impor BJLAS mengalami peningkatan dengan tren sebesar 25%, dimana impor dari negara yang dituduh dumping yaitu Vietnam mengalami peningkatan dengan tren sebesar 5% dan RRT mengalami peningkatan yang signifikan dengan tren sebesar 65%. Namun pada periode yang sama impor BJLAS yang berasal dari negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 22%. Sehingga jika dilihat dari tabel di atas bahwa walaupun impor dari negara lain mengalami kenaikan dengan trend sebesar 22% akan tetapi nilai ataupun kuantitas impornya jauh lebih kecil dibandingkan negara dituduh (RRT dan Vietnam). Oleh karena itu, kerugian yang dialami Pemohon berasal dari impor barang sejenis asal RRT dan Vietnam.

B.7.3. Teknologi

47. Secara umum dalam produksi BJLAS IDN menggunakan teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh produsen yang diselidiki. IDN mampu memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diselidiki. Oleh karena itu, teknologi bukan faktor yang menyebabkan kerugian IDN.

B.8. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.8.1 TANGGAPAN DARI TRADE REMEDIES AUTHORITY OF VIETNAM MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

First and foremost, the value-added tax (VAT) refund adjustments that the KADI has made to the export prices of certain Vietnamese producers and exporters are inappropriate. The TRAV would like to draw your attention to Article 2.4 OF WTO Antidumping Agreement (“ADA”) which provides:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

“A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability...”

As such, allowance shall only be made if there are differences which affect price comparability, but that has not been the case here. VAT is an indirect tax, which means the seller will collect it from the buyer and will later forward the VAT rate when they make purchases of goods or services. This also means that when companies make sales, they charge VAT on their sales, and the VAT amount is an additional amount received from the companies' customers. VAT that companies pay when they make purchases can be referred to as “input VAT” and “VAT that companies charge their customers when they make sales can be referred to as “output VAT”. Output VAT shall be paid by the companies to the tax authorities, but it shall also be offset with the input VAT that the companies paid when it made purchases (which was also already forwarded to the tax authorities by the sellers/suppliers of the inputs). Periodically, companies file VAT declarations and shall forward the tax proceeds (after deducting input VAT paid) to the tax authorities.

The mechanism applies to both export and domestic sales of Vietnamese companies. The difference in terminology (“tax credits” for domestic sales and “tax refund” for export sales) is only in name but the underlying mechanism is the same for both export and domestic sales. This difference does not change the fact that input VAT paid shall be deducted from output VAT payable and companies effectively do not bear input VAT regardless of whether the sales they make are domestic or export sales.

This mechanism is internationally known as “credit-invoice method” and is applied in many countries including Indonesia. The important point is that this does not affect price comparability between domestic prices and export prices of Vietnamese companies. Therefore, making an allowance in this regard is incorrect and has seriously violated Article 2.4 of the ADA.

Second, KADI has also used information in a previous anti-dumping investigation, namely direct export selling expenses in the anti-dumping investigation on imports of pre painted aluminum-zinc coated steel initiated by KADI in 2016, in its

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

calculations for this current case. The use of facts available in this case is not justifiable. Article 6.8 of the ADA reads:

"In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. The provisions of Annex II shall be observed in the application of this paragraph."

All participating Vietnamese producers/exporters in this case have acted to their best to co-operate with the KADI and have provided all necessary information requested by KADI. If for any reason the KADI finds such provided information insufficient or unacceptable, the TRAV strongly believes that they are minor errors and requests an opportunities for the Vietnamese producers to be informed and to correct them accordingly, in accordance with paragraph 6 of Annex II of the ADA which provides:

"If evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefor, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period due account being taken of the time-limits of the investigation..."

Paragraph 7 of Annex II of the ADA further provides:

"If the authorities have to base their findings, including those with respect to normal value, on information from a secondary source, including the information supplied in the application for the initiation of the investigation, they should do so with special circumspection."

The investigation was initiated nearly a year ago. But before July 30th, 2020, which was the date of issue of Essential facts, Vietnamese producers had not been aware of KADI's use of facts available. It has failed to give an opportunity to Vietnamese producers to revise, clarify and explain. So, this circumspection could not be called "special enough" for the KADI to make the determination basing their own findings. For the above reasons and given that the KADI entertains comments and opinions of interested parties by August 14, 2020, the TRAV respectfully inserts requests for KADI's final determination as below:

1. The KADI should exclude VAT refund adjustments from the calculations of export prices of Vietnamese producers, and
2. The KADI should consider any explanations and clarifications that Vietnamese companies might have and employ such information in its dumping margin

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

calculations. Also, the KADI should be thorough and reasonable in its calculations to ensure that there are no overlapping adjustments and fair comparison is made.

3. The KADI should be prudent in its calculation methodology and should carefully consider all factors to ensure fair comparison, in accordance with the rules set forth by the ADA.

The Trade Remedies Authority of Vietnam highly appreciates the kind and highest understanding and consideration from the Komite Anti-Dumping Indonesia. The TRAV also reserves the right to make further comments on this proceeding and raise claims in an appropriate forum if necessary.

48. **Tanggapan KADI**

Berdasarkan yurisprudensi dari kasus WTO terdahulu terkait perhitungan dumping margin yang diatur dalam Article 2.4 Anti-Dumping Agreement menyatakan bahwa dalam menghitung marjin dumping maka harus dibuat perbandingan yang adil (*fair comparison*) antara harga ekspor dan normal value, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Article 2.4 Anti-Dumping Agreement:

"..... Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability..."

Pengertian mengenai kewajiban penyidik terkait *price comparability* agar dapat membuat *adjustment* yang sesuai dalam menciptakan perbandingan harga yang adil antara harga ekspor dan nilai normal, sudah dibahas dalam berbagai kasus WTO yaitu salah satunya dalam kasus US – Hot Rolled Steel, dimana Appellate Body menyatakan dalam bagiannya yang terkait:

"Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement provides that, where there are 'differences' between export price and normal value, which affect the 'comparability' of these prices, '[d]ue allowance shall be made' for those differences. The text of that provision gives certain examples of factors which may affect the comparability of prices: 'differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences'. However, Article 2.4 expressly requires that 'allowances' be made for 'any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.' (emphasis added) There are, therefore, no differences 'affecting price comparability' which are precluded, as such, from being the object of an 'allowance.'"

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh *Appellate Body* dalam kasus tersebut bahwa apabila terdapat “perbedaan” antara harga ekspor dan normal value yang dapat mempengaruhi perbandingan harga atau *price comparability* maka harus dibuat adanya *adjustment* atas perbedaan tersebut, dan dalam *Article 2.4 Anti-Dumping Agreement* sudah menjabarkan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga seperti termin penjualan, pajak, level perdagangan, kuantiti, karakteristik fisik dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengenaan pajak dalam bentuk VAT rebate/refund adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perbandingan harga antara harga ekspor dan normal value.

VAT refund/rebate dapat dijadikan sebagai *due allowance* dalam melakukan *price comparability*, hal ini juga sudah didukung dengan berbagai *best practice* di negara-negara lain.

B.8.2 TANGGAPAN DARI EKSPORTIR (HSG, NAM KIM, TAY NAM, VINA ONE, YPC, TPK, SSSC)

The industrial indicators in the EF do not represent domestic industry within the meaning of Article 4.1 of the Agreement, read together with Article 3.1 of the Agreement

We had explained in our previous submitted legal brief to KADI that the Petitioner's production output cannot represent the domestic industry as it only constitutes 34% from the total production output of BJLAS in Indonesia

KADI clearly misunderstood this explanation as in recital 52 of the EF KADI explained that the 34% output is sufficient to fulfil the legal standing

Indeed, we did not contest the legal standing but the representativeness or sufficiency of the Petitioner's industry indicator who constitutes on 34% of the total production of BLAS in Indonesia. This is very much relevant to Article 4.1 read together with article 3.1 of the Agreement instead of Article 54 of the Agreement.

Article 4.1 of the Agreement provides as follows:

"For the purposes of this Agreement the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products to those of them whose collective output of the product".

As KADI stated in the EF, the Petitioner represent only 34% of the total production output of BJLAS in Indonesia. We therefore strongly question where is the data of the other Indonesian BJLAS producers who account for the remaining 66% production output of the total BJLAS Indonesian national output.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Very clearly that 34% does not constitute majority within the true meaning of Article 4.1 but for sure 66% does meet the criteria. As such the Petitioner with its 34% production output of BJLAS in Indonesia failed to meet the requirement of Article 4.1 of the Agreement.

Worse is that the exclusion of the other relevant data of other Indonesian producers of BJLAS while they expressed support to the petition does adversely impact on the objective examination of the requisite positive evidence required pursuant to Article 3.1 of the Agreement which provides:

"A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of their imports on domestic producers of such products". (Emphasis added)

The WTO Appellate Body Report EC - Fasteners (China) paragraphs 412-414 provide as follows:

The Appellate Body found: "A Major proportion'...should be understood as a proportion defined by reference to the total production of domestic producers as a whole. 'A major proportion' of such total production will standardly serve as a substantial reflection of the total domestic production. In our view, the above interpretation is confirmed by the purpose of defining the domestic industry under the Anti-Dumping Agreement. As footnote 9 to Article 3 on the Anti-Dumping Agreement indicates, the domestic industry forms the basis on which an investigating authority makes the determination of whether the dumped imports cause or threaten to cause material injury to the domestic producers...'a major proportion of the total domestic production should be determined so as to ensure that the domestic industry defined on this basis is capable of providing ample data that ensure an accurate injury analysis. (Emphasis added)

Furthermore, the Appellate Body in EC – Fasteners (China) (Article 21.5 – China) found 36% to be below in terms of the "major proportion" requirement of Article 4.1:

"We observe that the inclusion in the revised definition of the domestic industry of those producers that had come forward by the deadline but were excluded because they were not willing to be part of the sample increased the number of included producers from 45 to 70. We also note that the inclusion of these producers increased the proportion of total domestic production in the European Union from 27% in the original investigation to 36% in the review investigation.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

While the proportion relied upon in the review investigation is higher, a proportion of 36% of the total domestic production remains low, even in the context of the fragmented fasteners industry. Moreover, this low proportion could not be considered as a 'major proportion' within the meaning of Article 4.1, especially where the investigating authority relies on a process of defining the domestic industry that introduces a material risk of distortion". (Emphasis added)

The WTO established case laws as cited above determines the relationship between Articles 4.1 and 3.1 of the Agreement and it is undisputable that 34% output does not meet the requirements under Article 4.1 of the Agreement read together with Article 3.1 of the Agreement, especially. The deliberate exclusion of the data relating to the producers whose production represents the true majority of the industry in the EF has led to distortion in implementing the mandate under Article 3.1 of the Agreement.

As the Appellate Body has found, the term "positive evidence" focuses on the facts underpinning and justifying the injury determination. It relates to the quality of the evidence that the investigating authorities may rely on in making a determination, and requires the evidence to be affirmative, objective, verifiable, and credible.

Furthermore, the Appellate Body has interpreted the term "objective examination" as requiring an injury investigation under Article 3 to "conform to the dictates of the basic principles of good faith and fundamental fairness", and to be conducted "in an unbiased manner, without favouring the interests of any interested party, or group of interested parties, in the investigation".

In the EF, KADI mentioned the other Indonesian BJLAS producers supportive to the petition: Sunrise, Sarana, Java Pacific and Tata Logam and moreover in recital 54 of the EF, KADI stated that it had verified those producers but excluded the industrial data of those Petitioners from the EF.

This deliberation omission of relevant facts and evidence has caused gross distortion of facts namely the performance of the Petitioner and the rest of Indonesia BJLAS producers who expressly support to the petition.

As a result, KADI did not even present the new investment and expansion of BJLAS line of Java Pacific in 2018 which reflects its best performance and that it is commonly known that Java Pacific has very healthy performance and so have Sunrise and Sarana. Yet, KADI does not present their data in the EF, let alone to examine it.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

It is therefore that such purported findings of injury and causality in the EF are grossly inaccurate as it is totally unsupported if other relevant facts were to be taken into account. At best, KADI's findings are highly speculative and subject to challenge as it is completely inconsistent with fundamental requirements of Article 3.1 of the Agreement.

In light of the above laws and facts referred to, KADI is required to forthwith terminate the investigation.

49. **TANGGAPAN KADI:**

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa produksi Pemohon pada saat periode penyelidikan adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan produsen nasional lainnya sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai "*a major proportion*" sesuai dengan Article 4.1 WTO Antidumping Agreement dan Pasal 1 ayat (17) PP 34/2011. Hal ini juga dipertegas dalam putusan panel dalam kasus *China-Autos* dimana dalam paragraf 7.229 jelas dikatakan bahwa produksi domestik sebesar 33.5% dapat dianggap sebagai "*a major proportion*" sesuai Article 4.1 WTO ADA. Kasus *China-Autos* adalah kasus setelah *EC-Fastener* dimana dalam pertimbangannya panel juga mengacu pada putusan *EC-Fastener* yang mengklarifikasi kesalahpahaman Amerika Serikat atas putusan tersebut yang menyatakan bahwa:

"both the Anti-Dumping and SCM Agreements refer to "a" major proportion as opposed to "the" major proportion indicates that the percentage of production deemed a "major proportion" need not be greater than 50% of total production. We note in this respect that a panel previously accepted 46% of total production as sufficiently "important, serious or significant" to constitute a major proportion of total domestic production. Further, the Appellate Body in another dispute (EC-Fastener) did not a priori exclude the possibility that a figure as low as 27% of total domestic production might constitute a major proportion of total domestic production, depending on the circumstances."

Perlu dipahami bahwa permasalahan kasus *EU – Fastener* bukanlah presentase dari produksi domestik dari kasus tersebut melainkan aplikasi metode sampling yang dilakukan EU dalam membuat definisi domestik industry. Hal ini juga yang dipermasalahkan oleh Panel 21.5 dalam kasus yang sama karena EU masih menggunakan metode yang serupa.

Selain itu juga perlu dicatat bahwa, pengertian industri dalam negeri yang ada dalam Article 3 dan Article 4.1 adalah sama, sebagaimana ditegaskan dalam Panel di *Mexico – Corn Syrup* yang menyatakan:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

“These two provisions inescapably require the conclusion that the domestic industry with respect to which injury is considered and determined must be the domestic industry defined in accordance with Article 4.1.”¹

Oleh karena itu, KADI menegaskan bahwa analisa kerugian yang dilakukan oleh KADI sudah berdasarkan data informasi yang diperoleh selama hasil penyelidikan dan yang telah diverifikasi. Disamping itu sebagaimana terlihat pada resital 43 pada analisa hubungan sebab akibat (dampak volume secara relatif), dimana terbukti adanya trend penurunan pangsa pasar dari IDN lainnya sebesar 2% selama periode penyelidikan.

No Efidence of Injury

Based on your explanation above, important to note is that the above industrial performance indicators consist exclusively only the data of the Petitioner. Although the rest of 66% of the Indonesia BJLAS producers expressly support the Petitioner, two of which were even verified by KADI, none of their industrial performance indicators is presented in the EF.

The cherry-picking approach by KADI in selecting data used in the EF, as we explained above, is totally wrong and misleading, causing distortion in the purported findings by KADI in relation to the purported injury and causality analysis in the EF.

As such, it is the submission of HSG that it would be wrong for KADI to make any determination based on distorted data and selective evidence used by KADI.

We would like to also reiterate that this is inconsistent with the mandate of Article 3.1 of ADA which requires the relevant authority to present positive evidence which shall be examined objectively.

We further remind KADI of our arguments in the legal brief previously submitted to KADI on 15 July 2020 that the claim of injury of the Petitioner surely cannot represent the condition of domestic industry of BJLAS in Indonesia as a whole. Data and information contained in the petition including above figures only exclusively represent the Petitioner and its interest.

If the rest 66% of the Indonesian BJLAS producers were to suffer material injury, they would have been part of the Petitioner in this investigation. Yet, in fact they are not part but only supporters of the petition, for which they are also required to submit the injury data as the Petitioner had done so.

¹ Panel Report, Mexico – Corn Syrup, para. 7.147

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

It is therefore very clear that the exclusion of their industrial indicators in this investigation is deliberate to distortedly show the stand-alone injury of the Petitioner and that the inclusion of the data of the other 66% of Indonesian BJLAS producers would not be supportive to the Petitioner because they are in a totally healthy condition.

50. **TANGGAPAN KADI:**

Sudah KADIanggapi pada resital 49.

Selain itu perlu dicatat bahwa tidak ada keharusan maupun kewajiban untuk seluruh produsen dalam negeri harus menjadi pemohon dalam penyelidikan anti-dumping. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Article 4.1 of ADA bahwa otoritas penyelidik dapat menentukan bahwa industri dalam negeri sebagai “*a major proportion*”, yang dalam hal ini sudah dilakukan oleh KADI.

Moreover, we would like to reiterate that in the above figures and its presentation of injury, KADI failed to consider some fundamental facts in this investigation namely: (i) the Petitioner’s production of BJLAS only focuses on greater thickness of above 0,3mm; (ii) captive use of BJLAS as material of pre-painted color coated steel (PPGL) within the Petitioners; (iii) some of Indonesian BJLAS imported significant volume of BJAS from the alleged countries; (iv) significantly lack of supply of BJLAS from the Petitioner and even if combined with the other Indonesian producers to national demand in Indonesia producers; (v) misrepresentation of the production capacity of BJLAS of the Petitioner as its production facility is combined for BJLAS is combined with pre-painted color printing coated steel (PPGL); (vi) fierce competition between Indonesian BJLAS producers especially the new expansion

In the absence of adequate and objective examination of the above factors the findings of KADI in the EF becomes unjustified and misleading.

The absence of inclusion of data from the rest of Indonesian producers of BJLAS has adversely distorted the injury and causality analysis of KADI in the EF. This has led to misleading and bias output of the analysis.

51. **TANGGAPAN KADI:**

- (i) Produksi Pemohon tidak hanya terfokus pada produk BJLAS dengan ketebalan diatas 0.3 mm saja, Pemohon mampu memproduksi produk dengan ketebalan 0.2 mm sampai dengan 0.3 mm. Pemohon juga menjual BJLAS dengan ketebalan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

tersebut dengan nama brand seperti Abadi, Bluescope Zacs, dan Perisai. Hal ini sudah dibuktikan melalui sample invoice yang diberikan Pemohon kepada KADI pada saat verifikasi.

- (ii) Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi bahwa seluruh kapasitas terpasang yang Pemohon sudah sampaikan merupakan kapasitas untuk memproduksi BJLAS dan tidak termasuk kapasitas Pemohon untuk pengecatan. Perlu dicatat bahwa BJLAS warna merupakan BJLAS bare yang kemudian dicat sehingga kapasitas BJLAS warna dihitung dari kapasitas berdasarkan fasilitas pengecatan yang dimiliki oleh Pemohon.
- (iii) Berdasarkan Pasal 1 butir 17 PP 34/2011 dan *Article 4.1 WTO Antidumping Agreement* otoritas KADI adalah hanya dapat mengecualikan suatu produsen yang terafiliasi dengan importir barang dumping dari cakupan industri dalam negeri. Bila hal ini terjadi maka proporsi standing Pemohon akan menjadi lebih besar. Tidak ada satupun pasal baik dalam *WTO Antidumping Agreement* maupun PP 34/2011 yang mewajibkan otoritas menghentikan penyelidikan bilamana ditemukan adanya pendukung permohonan yang melakukan importasi barang dumping.
- (iv) Kapasitas produsen BJLAS di Indonesia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada saat ini, terutama mempertimbangkan adanya peningkatan kapasitas dari PT. Sunrise Steel dan PT Java Pasific, serta kehadiran PT. Tata Metal Lestari yang mulai beroperasi di akhir tahun 2019. Sehingga pada saat ini total kapasitas nasional sudah memenuhi lebih dari 100% dari konsumsi nasional
- (v) KADI telah melakukan analisa terkait persaingan industri dalam negeri. Penjualan produsen dalam negeri lainnya naik seiring dengan kenaikan konsumsi nasional yang naik hingga 42% di tahun 2018. Namun, kenaikan penjualan produsen dalam negeri tidak sebanding dengan kenaikan impor dari negara tertuduh yang naik pesat di tahun 2018 dengan pangsa pasar 59%. Lebih lanjut, pangsa pasar IDN lainnya juga mengalami penurunan tren selama 2016 – 2018 sebesar 2%. Angka diatas juga diperkuat dengan surat dukungan dari produsen lainnya yang telah disampaikan ke KADI yang menyatakan seluruh industri dalam negeri produsen Barang Yang Sedang Diselidiki sedang menderita kerugian material yang disebabkan oleh barang dumping dari negara tertuduh. Hal ini juga sudah diselidiki oleh KADI ke masing-masing perusahaan pendukung

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

We note that some performance indicators of one of other Indonesian BJLAS producer, namely PT Saranacentral Bajatama Tbk during the POI was completely healthy.

Its annual report shows the following:

	Year 2016	Year 2017	Year 2018
Production Volume of BJLAS in MT	38.268,60	47.881,80	53.113,40
(Source: Page 5 of 2017 Annual Report and page 5 of 2018 Annual Report 2018, of PT Saranacentral Bajatama Tbk.)			
Net Sales (All Product) in Million Rp after return and Discount*	978.840,64	1.218.317,83	1.279.809,88
Net Sales (BJLAS) in Million Rp*	384.770,17	557.265,61	726.000,97
	39,3%	45,5%	56,6%
(Source: Page 37 of 2017 Annual Report and page 38 of 2018 Annual Report 2018 of PT Saranacentral Bajatama Tbk.)			
Note: *) Based on Sarana's annual report 2017 page 38 and Sarana's annual report 2018 page 39, the net sales reported on that page are all sales in the domestic market.			

During the period of investigation Sarana was able to increase its BJLAS production from 38,268.60 MT in 2016 to 47,881.80 MT in 2017, and in 2018 it increased again by 53,113.40 MT. This contradicts with petitioner, which actually reduced its production.

In terms of net sales, throughout 2016 to 2018 Sarana was able to continuously increase sales of its BJLAS products. The sales development of BJLAS products even increased in the portion of its total net sales from 39.3% to 56.6%. From the Sarana data, KADI should see it as an indication of anomaly in performance of petitioner compared to the other Indonesian BJLAS producer.

The above referenced data shows nothing but significant increased PT Sarana's performance which at the same time shows that it is indeed very healthy and was not impacted by import of BJLAS from the alleged countries.

52. **TANGGAPAN KADI:**

Evaluasi data dan verifikasi yang dilakukan oleh KADI tidak hanya terhadap data Pemohon, tetapi juga sudah dilakukan terhadap IDN lainnya. yaitu PT. Saranacentral Bajatama, Tbk., PT. Sunrise Steel, PT. Tata Metal Lestari dan PT. Java Pacific, yang menunjukkan bahwa IDN lainnya juga mengalami penurunan kinerja. Perlu dicatat juga bahwa peningkatan produksi dan penjualan PT. Saranacentral Bajatama Tbk. sebagaimana dikutip diatas hanya meningkat dalam kuantitas karena PT. Saranacentral Bajatama Tbk. pada periode 2017 - 2018 PT. Saranacentral Bajatama Tbk. membukukan kerugian.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Selain itu, peningkatan penjualan IDN lainnya hanya secara absolut namun secara relatif penjualan IDN lainnya juga menurun. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan konsumsi nasional selama periode penyelidikan. Namun impor dari negara yang dituduh meningkat sangat tajam baik secara absolut maupun secara relatif.

KADI juga sudah melakukan penyelidikan ke para pendukung dimana KADI sudah mengevaluasi bahwa IDN lainnya juga terganggu seperti Pemohon dengan adanya impor barang dumping yang menguasai pasar domestik di Indonesia.

This is also to confirm that the use of data which only represents 34% of total production of BJLAS but completely ignored the data of the other producers constituting 66% of the output BJLAS in Indonesian is unjustified as by doing so the examination of injury and causality of KADI is bias, invalid and completely against Article 3.1 of the Agreement.

53. TANGGAPAN KADI:

Telah KADI tanggapi pada resital 49 dan 50.

Further Article 3.4 of the Agreement mandates the investigating authorities to examine the non-exhaustive list of industry indicators namely including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investment. Although the injury indicators presented in the petition is inaccurate and misleading in the absence of analysis or presentation of the above-mentioned critical factors and especially the exclusion of data from the other BJLAS producers, we will present our analysis on the injury indicators as per table we cited from the EF above.

Based on the above table, the domestic sales of the Petitioner both quantity and value experienced positive growth in in 2017 but slightly decreased in the IP. The Petitioner's production also declined in the POI. This applies in the situation where the national consumption growth.

It is clear that such decrease was solely caused by the following factors: (i) expansion of the other Indonesian producers of BJLAS; (ii) the new established production plant of the Petitioner's customers; (iii) increase national demand on BJLAS of 0,2mm-0,3mm which the Petitioners does focus or intend to focus on (iv)

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

decrease of BJLAS' Indonesian national consumption of above 0,3mm; and (v) the Petitioner's captive use of BJLAS.

54. **TANGGAPAN KADI:**

- (i) KADI sudah mengevaluasi dan memverifikasi bahwa perluasan kapasitas produksi IDN lainnya bertujuan untuk memenuhi konsumsi nasional. Namun, pada saat ini investasi yang sudah dilakukan IDN tidak dipergunakan secara optimal dikarenakan impor barang dumping, sehingga tingkat utilisasi Pemohon dan IDN lainnya tetap rendah;
- (ii) Terkait produk BJLAS 0.2 mm – 0.3 mm lihat jawaban resital 51 diatas, selain itu diperlukan pembuktian dari pihak yang berkepentingan terkait pernyataan bahwa kenaikan konsumsi nasional BJLAS dikarenakan permintaan produk BJLAS dengan ketebalan 0.2 mm – 0.3 mm;
- (iii) Terkait *captive use* dari Pemohon lihat jawaban resital 51.

While, as we noted above, it is generally known that irrespective of import the rest of the Indonesian BJLAS producers were healthy and kept expanding, only the Petitioner did not (see table 10 of NCC where production of the rest of the Indonesia producers of BJLAS increased by 96%). This is anomaly which KADI did not even examine in the EF, confirming that findings of the EF were not based on positive evidence involving objective examination.

55. **TANGGAPAN KADI:**

Perlu dicatat bahwa tabel 10 dalam petisi tidak menunjukkan adanya peningkatan produksi penjualan dalam negeri lainnya sebesar 96%, melainkan adanya penurunan pangsa pasar IDN lainnya pada tahun 2018 sebesar 4 indeks poin. Sehingga anggapan bahwa kondisi IDN lainnya membaik adalah tidak berdasar.

As further consequent the same applied to its profit, capacity utilization, productivity, although its domestic price increased significantly and likewise its inventory.

56. **TANGGAPAN KADI:**

Kenaikan harga dalam negeri disebabkan oleh biaya produksi IDN yang terus meningkat karena kenaikan bahan baku CRC yang menjadi sumber utama bahan baku. Namun kenaikan ini tidak sebanding dengan biaya produksi IDN yang akibatnya *profit margin*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

IDN terus menurun hingga harus menjual rugi di tahun 2018. Persediaan IDN meningkat karena penurunan penjualan dalam negeri di tahun 2018.

Please however note that the decreased production and capacity utilization level were direct consequences of Petitioner's own inability to meet the increasing domestic demand.

57. TANGGAPAN KADI:

Penurunan produksi dan kapasitas terpakai disebabkan karena penurunan penjualan dalam negeri dengan tren sebesar 4%, yang mana penurunan penjualan ini diakibatkan karena IDN tidak mampu bersaing dengan barang impor.

It should be noted that the Petitioner focused on the production and sales of the subject merchandise for industrial grade for which the Petitioner's concentration is limited to the subject merchandise having a thickness of above 3mm. The demand of the subject merchandise in Indonesia has been significantly dominated by housing sector as part the Government of Indonesia's vital projects. This housing project of the Government of Indonesia is to provide houses to lower income people in Indonesia.

Under this situation import, especially from Vietnam, is inevitably needed and cannot therefore be attributable to any performance of the Petitioner. Moreover, the other Indonesian producers of the product concerned performed very well as opposite of the Petitioner.

58. TANGGAPAN KADI:

Terkait kemampuan produksi Pemohon untuk ketebalan diatas 3 mm sudah kami jelaskan pada resital 51

Perlu dicatat bahwa pengenaan BMAD tidak berarti menutup/melarang masuknya barang impor dari baik negara yang tertuduh maupun negara lainnya, sehingga keawatiran akan adanya kekurangan pasokan akibat pengenaan BMAD merupakan keawatiran yang tidak berdasar. Selain itu, pada saat ini kemampuan industri dalam negeri sudah dapat memenuhi konsumsi nasional 100%.

As claimed by the Petitioner itself in the NCC, in the EF KADI maintains that cash flow, ROI, and ability to raise capital indicators represent consolidated figures for

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

whole company, and as such cannot reflect a representative indications of the Petitioner's performance for the product concerned.

59. **TANGGAPAN KADI:**

Apabila data untuk barang yang diselidiki tidak dapat dipisahkan maka KADI dapat menggunakan data yang sifatnya lebih luas tetapi mencakup barang yang diselidiki. Hal ini juga ditegaskan oleh Panel dalam kasus *EC – Tube or Pipe Fittings* yang menyatakan:

*"[W]hile data and information pertaining specifically to the 'like product' is to be used to the extent possible, the Agreement also envisages resort to a broader spectrum of data where separate identification of like product specific data is not possible. It is therefore permissible for an investigating authority to assess the effects of the dumped imports by the examination of the production of a broader range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided if likeproduct-specific information is not available."*²

No change in installed capacity level while the other Indonesian producers did have the new investment on BJLAS production which is also not disclosed and addressed in the EF.

60. **TANGGAPAN KADI:**

KADI sudah melakukan penyelidikan dengan seksama bahwa selama periode penyelidikan Tata Logam masih belum beroperasi, namun KADI sudah mencatat bahwa peningkatan kapasitas yang dilakukan produsen lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

For the overall examination of injury, Article 3.4 Agreement requires an examination of all relevant economic factors of the domestic industry. Further, WTO Panel in Thailand Anti- Dumping on Steel and H-Beams from Poland interpreted Article 3.4 Agreement as follows:

"We are of the view that the "evaluation of all relevant factors" required under Article 3.4 must be read in conjunction with the overarching requirements imposed by Article 3.1 of "positive evidence" and "objective examination" in determining the existence of injury. Therefore, in determining that Article 3.4 contains a mandatory list of fifteen factors to be looked at, we do not mean to

² Panel Report, *EC – Tube or Pipe Fittings*, para. 7.237.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

establish a mere "checklist approach" that would consist of a mechanical exercise of merely ensuring that each listed factor is in some way referred to by the investigating authority. It may well be in the circumstances of a particular case that certain factors enumerated in Article 3.4 are not relevant, that their relative importance or weight can vary significantly from case to case, or that some other non-listed factors could be deemed relevant. Rather, we are of the view that Article 3.4 requires the authorities properly to establish whether a factual basis exists to support a well-reasoned and meaningful analysis of the state of the industry and a finding of injury. This analysis does not derive from a mere characterization of the degree of "relevance or irrelevance" of each and every individual factor, but rather must be based on a thorough evaluation of the state of the industry and, in light of the last sentence of Article 3.4, must contain a persuasive explanation as to how the evaluation of relevant factors led to the determination of injury."

The AB in China Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel / GOES (DS 414), paragraph 128 states that *"the paragraphs of Article 3 thus contemplate a "logical progression" in the investigating authority's examination leading to an ultimate determination of whether dumped imports are causing material injury to the domestic industry"*.

In the same paragraph it went on saying that *"this process entails a consideration of the volume of dumped imports and their price effects, and requires an examination of the impact of such imports on the state of the domestic industry as revealed by a number of economic factors and indices. These various elements are linked through a causation and non-attribution analysis between the dumped imports and the injury to the domestic industry, taking into account all factors that must be considered and evaluated."*

Given the above critical facts, in the absence of inclusion of data from other BJLAS producers along with adequate and objective assessment of (i) the Petitioner's production of BJLAS only focuses on greater thickness of above 0,3mm; (ii) captive use of BJLAS as material of pre-painted color coated steel (PPGL) within the Petitioners; (iii) some of Indonesian BJLAS imported significant volume of BJLAS from the alleged countries; (iv) significantly lack of supply of BJLAS from the Petitioner and even if combined with the other Indonesian producers to national demand in Indonesia producers; (v) misrepresentation of the production capacity of BJLAS of the Petitioner as its production facility is combined for BJLAS is

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

combined with pre-painted color printing coated steel (PPGL); (vi) fierce competition between Indonesian BJLAS producers especially the new expansion KADI's examination of injury is distorted and misleading, the validity of the findings of KADI in the EF is greatly doubted.

61. TANGGAPAN KADI:

Telah KADIanggapi pada resital 49-51 dan resital 54

Improper analysis of causal link between import and injury

Article 3.2 and 3.5 the Agreement requires the analysis of causal link between dumped imports and injury claimed to be suffered by the Petitioners.

In the absence of proper and objective examination of the above factors and the inclusion of data from the other Indonesia BJLAS producers, the findings of KADI in the EF becomes unjustified.

Below is Table 10 of the EF on volume effect analysis.

National consumption and BJLAS Domestic market share

No	Description	2016	2017	2018	Trend%
1	IDN sales	18	17	12	(19)
2	Other IDN sales	23	24	23	-
3	PRC	16	19	31	40
	Vietnam	35	31	28	(11)
	Dumping import	51	50	59	8
4	Import others country	6	9	6	3
5	National consumption*	100	100	100	-
	National consumption**	100	118	140	18

Source: BPS, IDN, processed

Note: *) is a market share where national consumption data is the reference data

***) is the development of national consumption using the 2016 data as a comparative reference data

We are questioning as to why the sales data of the other Indonesian BJLAS producers changed significantly from Table 10 NCC and that the indexing pattern in Table 10 above does not start from 100.

62. TANGGAPAN KADI:

Dalam Tabel 10, KADI menampilkan pangsa pasar dari penjualan Pemohon, Penjualan IDN lainnya, impor dari negara tertuduh dan impor dari negara lainnya dimana hal ini merupakan analisa kenaikan impor secara relative yang merupakan bagian dari analisa *causal link* dalam penyelidikan ini sesuai dengan Art. 3.5 of ADA.

In Table 10 of the NCC it was shown that the other Indonesian producers' domestic sales increased by 96% but this is different from the EF which shows other

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Indonesia BJLAS producers' domestic sales was stagnant. We believe that this is once again due to selective use of data by KADI. Yet their sales were relatively stable which impact did not have impact.

The increased amount of alleged dumped imports was said to have absorbed most of the shares resulted from the increase of national consumption.

63. **TANGGAPAN KADI:**

Dalam tabel 10 NCC tidak ada data yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 96% dari penjualan produsen dalam negeri lainnya selama periode penyelidikan. Data yang ditunjukkan dalam NCC menunjukkan adanya penurunan penjualan dalam negeri lainnya secara relatif sebesar 4% walaupun terdapat peningkatan secara absolut sebesar 36% pada tahun 2018.

Perlu dicatat bahwa peningkatan impor dari negara tertuduh baik secara absolut maupun secara relatif merupakan yang terbesar. Secara absolute impor mengalami peningkatan sebesar 62% dan secara relative mengalami peningkatan sebesar 14% di tahun 2018. Peningkatan impor ini melebihi peningkatan konsumsi nasional yang hanya sebesar 42% di tahun 2018.

First, as we have elaborated above, the Petitioner (along with other domestic industry) cannot meet the unprecedented increasing domestic demand due to their limited production capacity and production focus which is only for above 0,3mm.

It is also known that the Petitioner is a vertically integrated company, having its affiliate company in the downstream sector which uses Petitioner's product as raw material for their production process.

Moreover, BJLAS is direct material to use PPGL which the Petitioner is known to use its own BJLAS for its captive production of PPGL. It is likely that any decrease of BJLAS' production due to its reduced production for PPGL which had nothing to do with import of BJLAS from Vietnam

Indeed, also the very fact is that the sales volume of the Petitioner was tremendously affected by the domestic competition as the other Indonesian producers of the subject merchandise, increased their production and sales at incredibly significant rate.

This clearly shows that it was Petitioner's own inability to compete with other domestic producers which caused them to lose their share in the domestic market, which has absolutely nothing to do with imports of the subject merchandise.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Thus in term of volume effect, there is undeniable fact that imports of the product concerned did actually not have any impact on the domestic sales volume of the Petitioner but it was rather a self-inflicted factor due to the Petitioner's captive use, and the lack of supply capacity to the domestic market and fierce competition from the other Indonesian producers of the subject merchandise.

64. **TANGGAPAN KADI**

- a. Terkait produksi Pemohon hanya diatas 0.3 mm, persaingan dalam negeri dan *captive use* lihat jawaban resital 51.
- b. Tidak ada larangan baik dalam PP 34/2011 maupun *Anti Dumping Agreement* yang menyatakan bahwa Pemohon tidak boleh terintegrasi secara vertikal dengan industri hilirnya. Bahkan merupakan hal yang sudah lazim dalam penyelidikan anti-dumping baik di Indonesia maupun di negara-negara WTO lainnya dimana Pemohon penyelidikan antidumping merupakan perusahaan yang terintegrasi vertikal.
- c. Terkait volume efek dari impor dumping dari negara tertuduh lihat jawaban resital 63.

Instead, import of the subject merchandise actually compliments the Petitioner in fulfilling the domestic market demand of the product concerned due to the limited capacity of the Petitioner.

65. **TANGGAPAN KADI:**

Kemampuan kapasitas IDN dalam memenuhi konsumsi nasional. Perlu dicatat bahwa pengenaan BMAD tidak berarti adanya larangan masuknya impor baik dari negara tertuduh maupun negara lainnya. Pengenaan BMAD bertujuan untuk meningkatkan harga barang dumping sampai ke tingkat perdagangan yang adil guna menciptakan persaingan yang sehat dan adil antara barang dalam negeri dan barang impor, yang sebagaimana telah dijawab pada resital 51.

As for price effect, we noted that in Table 11 of the EF, KADI still used BPS's data although it has received export sales data from the producers engaged in the investigation.

This means that KADI repeats what the Petitioner presented in its petition. As a consequence, the findings of KADI in the EF in respect of prices effect were wrongly made as it compares the import price and the Petitioner's domestic prices based on generalization of all types of the product concerned which disallowed a fair and objective comparison for determining price effect.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Instead, for fairness and objectivity, the comparison of the domestic price of the Petitioner and import's price should be made on type per type basis or comparable like product which KADI has it but does not do so.

In paragraph 5.168 of WTO AB Report (DS 454) on China Measure imposing anti-dumping duty on high performance stainless steel seamless tubes (HPSSST), it addressed the fact that the Panel's finding that China acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.2 of the Anti-Dumping Agreement because MOFCOM did not properly establish that the prices of imports and domestic like products were "comparable" for the purpose of considering price undercutting by imports of Grade C products given that it failed "to properly account for differences in quantities when comparing the price of Grade C subject imports with the domestic Grade C price.

The AB further states in the same Report in paragraph 5.169 that as it explained above, the inquiry under Article 3.2 is concerned with the effect of the dumped imports on the prices of domestic like products. It was therefore not sufficient for MOFCOM to make a finding of price undercutting based only on the fact that, in 2010, there was a mathematical difference between the prices of the imports of Grade C HP-SSST and those of domestic Grade C HP-SSST. Instead, it said that MOFCOM ought to have taken into account whether that mathematical difference amounted to significant price undercutting in the light of the facts underlying the investigation and the considerations we explained above.

According to the AB in the same paragraph of its Report that an objective examination would have taken into account all the positive evidence relating to, inter alia, the contrary price movements of the Grade C imports and domestic Grade C, as well as the limited period during which the perceived mathematical difference occurred.

Lastly in its conclusion the AB stated that for all these reasons, it upholds the Panel's findings, in paragraphs 7.188 and 7.205 of the Panel Reports, paragraph 8.1.a.iii of the Japan Panel Report, and paragraph 8.6.d.iii of the EU Panel Report, that China acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement because MOFCOM improperly relied on the market share of dumped imports, and its flawed price effects and impact analyses, in determining a causal link between dumped imports and material injury to the domestic industry, and made no finding of cross-grade price effects whereby price undercutting by Grade

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

B and C imports might be shown to affect the price of domestic Grade A HP-SSST. (Emphasis added)

The findings of KADI in the EF is clearly inconsistent with the AB's determination above which requires type by type (comparable) product is assessed to examine the existence and impact of import price.

The determination of AB above also requires the examination of all grades (types) which KADI failed to do in the EF as it limited the examination of injury and causality only to the Petitioner which might not produce and sell of all types of BJLAS, but these grades were sold by other Indonesian BJLAS producers. This is to reaffirmed that the exclusion of data of the other BJLAS producers who support to the petition in the EF and possibly throughout this investigation is completely inconsistent with Article 3.1. 3.2 and also 3.5 of the Agreement.

66. **TANGGAPAN KADI:**

KADI sudah melakukan analisis terkait *price effect* sesuai dengan Article 3.2 of ADA, dimana tidak ada kewajiban bagi penyelidik untuk melakukan analisa *price effect* harus untuk setiap tipe produk barang yang diselidiki. Bahkan *best practice* negara lain seperti Australia juga melakukan analisa terkait *price effect* tidak dipisahkan untuk setiap tipe barang seperti dalam kasus *A4 copy paper*.

Perlu dicatat bahwa pemahaman *Appellate Body* terkait Article 3.2 ADA dalam kasus China – HP-SSST (Japan) tidak menekankan pada kewajiban penyelidik untuk melakukan analisa yang dipisahkan per tipe produk melainkan:

- a. Dalam kasus tersebut otoritas penyelidik dari China telah salah dalam melakukan analisa *price undercutting* dalam pengertian Article 3.2 ADA karena hanya membandingkan grade tertentu saja dengan alasan *share import* dari grade A (yang tidak dianalisa dalam hal ini) berjumlah sangat kecil. Namun, AB dalam hal ini menyatakan:

“In the case before us, we consider that an objective examination by MOFCOM of whether there had been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the prices of the domestic like product (encompassing all three product types) should have taken into account the relevant market shares of the respective product types. Likewise, a proper analysis of price effects ought to have taken into account the fact that there were significant differences in the prices of these product types. As discussed above, an investigating authority may not disregard evidence suggesting that the

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

dumped imports have no, or only a limited, effect on domestic prices.”

- b. Dalam kasus tersebut otoritas penyelidik dari China telah salah melakukan analisa *price undercutting* dikarenakan tidak ada analisa yang komprehensif atas kenaikan harga domestik dan penurunan harga impor, selain dari pernyataan bahwa adanya kenaikan dalam harga di domestik dan harga impor dumping menurun seperti yang dinyatakan oleh AB:

“As explained above, in order properly to carry out an analysis of whether there had been significant price undercutting by dumped imports of Grade C, MOFCOM would have been required, pursuant to Articles 3.1 and 3.2 of the Anti-Dumping Agreement, to undertake a dynamic assessment of price developments and trends in the relationship between the prices of the dumped imports of Grade C and those of the domestic Grade C over the duration of the POI. Yet, we note that MOFCOM did not explain the basis for its finding that imports of Grade C were underselling domestic Grade C despite the fact that the price of domestic Grade C “increased by 112.80% from 2009-2010”, while the prices of dumped imports of Grade C “actually fell over that period”

Sehingga perlu dicatat bahwa KADI sama sekali tidak melakukan hal yang bertentangan dengan keputusan AB dalam kasus China – HP-SSST (Japan). Fokus dan penerapan hasil keputusan AB dalam hal ini bukan terkait bagaimana analisa *price undercutting* harus dilakukan per tipe produk.

Selain itu juga perlu dicatat bahwa analisa terkait *price effect* dalam pengertian *Article 3.2 ADA* harus dibedakan dengan metode perhitungan margin dumping yang ada dalam *Article 2.4.2 ADA*. Terkait *price effect*, *Article 3.2 ADA* hanya menyebutkan:

*With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider **whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.***

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Sedangkan terkait perhitungan dumping margin, *Article 2.4.2 ADA* menyebutkan:

Subject to the provisions governing fair comparison in paragraph 4, the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of prices of all comparable export transactions or by a comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be compared to prices of individual export transactions if the authorities find a pattern of export prices which differ significantly among different purchasers, regions or time periods, and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of a weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.

Hal ini jelas bahwa berdasarkan *wording* dari *Article 2.4.2* dan *Article 3.2 ADA*, kewajiban untuk metode perhitungan yang diharuskan per tipe produk/PCN hanya terkait dalam perhitungan dumping margin ketika membandingkan harga domestik barang yang diselidiki dengan harga eksportnya dari negara tertuduh.

Moreover, we found that the Petitioner was able to increase their domestic selling price over 20% in Table 14 of the EF, a sign that import price of BJLAS from the alleged countries has no impact on the Petitioner.

67. TANGGAPAN KADI:

Telah KADI tanggap pada resital 56.

No proper analysis on non-attribution factors

Second sentence of Article 3.5 of the Agreement requires KADI to examine any other factors that caused injury other than dumped imports.

The EF failed to present analysis on non-attribution factors involving: (i) the Petitioner's production of BJLAS only focuses on greater thickness of above 0,3mm; (ii) captive use of BJLAS as material of pre-painted color coated steel (PPGL) within the Petitioners; (iii) some of Indonesian BJLAS imported significant volume of BJAS from the alleged countries; (iv) significantly lack of supply of BJLAS from the Petitioner and even if combined with the other Indonesian producers to national demand in Indonesia producers; (v) misrepresentation of the

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

production capacity of BJLAS of the Petitioner as its production facility is combined for BJLAS is combined with pre-painted color printing coated steel (PPGL); (vi) fierce competition between Indonesian BJLAS producers especially the new expansion

The examination of non-attribution factor under Article 3.5 of the Agreement is mandatory and such examination of the non-attribution factor must be made separately with those factors related to imports.

We recall that in US – Hot-rolled Steel the Appellate Body provides:

“In US - Hot-Rolled Steel, the Appellate Body considered that the Panel had erred in its interpretation of the non-attribution language by finding that this language does not require the investigating authorities to separate and distinguish the injurious effects of the other known causal factors from the injurious effects of the dumped imports. The Panel had followed the interpretive approach set forth by the GATT Panel in US — Norwegian Salmon AD which the Appellate Body thus also presumably considered erroneous. The Appellate Body ruled that “in order to comply with the non-attribution language in that provision, investigating authorities must make an appropriate assessment of the injury caused to the domestic industry by the other known factors, and they must separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those other factors. This requires a satisfactory explanation of the nature and extent of the injurious effects of the other factors, as distinguished from the injurious effects of the dumped imports”

In the same report, the Appellate Body stresses:

“The Appellate Body in US — Hot-Rolled Steel acknowledged the practical difficulty of separating and distinguishing the injurious effects of different causal factors but indicated that “although this process may not be easy, this is precisely what is envisaged by the non-attribution language. If the injurious effects of the dumped imports and the other known factors remain lumped together and indistinguishable, there is simply no means of knowing whether injury ascribed to dumped imports was, in reality, caused by other factors. Article 3.5, therefore, requires investigating authorities to undertake the process of assessing appropriately, and separating and distinguishing, the injurious effects of dumped imports from those of other known causal factors.”

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

The petitioner and EF failed to address the above situation as non-attribution factors and this is clearly inconsistent with Article 3.5 of the Agreement we cited above.

68. **TANGGAPAN KADI:**

Lihat jawaban pada resital 61 diatas

Selain itu perlu dicatat bahwa KADI sudah melakukan analisa faktor lain yaitu antara lain perkembangan konsumsi nasional, impor negara lain dan teknologi. KADI juga sudah menjelaskan dan memberikan tanggapan terkait persaingan dalam negeri yang mana bukan penyebab dari kerugian yang dialami oleh Pemohon.

Terkait kewajiban otoritas penyelidik dalam Article 3.5 ADA, Panel di kasus *China – X-Ray Equipment* menyatakan:

*“As a general proposition, we agree with China that if there is no relevant evidence before an investigating authority to indicate that a factor is injuring the domestic industry, there is no requirement for the investigating authority to make a finding regarding whether the factor is indeed causing injury, and subsequently to proceed to conduct a non-attribution analysis”.*³

The significant import of BJLAS from the alleged countries known to have made by some Indonesian producers of BJLAS themselves

As we presented above some BJLAS producers imported significant amount of BJLAS from the alleged countries.

Instead of analyzing this undeniable facts in recitals 43-44 KADI states as follows;

“ B.8.1. APBRI & ASBARINDO

BJLAS producers themself imported from the 2 alleged countries including the Petitioners who also imported.

KADI Answer:

42. Based on data from BPS, there are no supporting local producers (PT. Saranacentral Bajatama, Tbk., PT. Sunrise Steel, PT. Tata Logam Lestari and PT. Java Pacific) or the applicant (PT. NS Bluescope Indonesia) that imports goods. investigated through HS code 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 of the two accused countries during the investigation period

³ Panel Report, *China – X-ray Equipment*, para. 7.267.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

A local BJLAS producer imports a significant amount through PT. Great Fortune and PT. Tata Logam. KADI accepted the fact that BJLAS producers themselves enjoyed imports from the two accused countries but later supported an anti-dumping investigation.

KADI Answer:

43. Based on Article 1 point 17 Government regulation 34/2011 and Article 4.1 of the WTO Antidumping Agreement, the KADI only has the authority to exclude a producer affiliated with a dumping goods importer from the scope of the domestic industry. If this happens, the proportion of Petitioners' standing will be greater. There is not a single article in either the WTO Antidumping Agreement or Government regulation 34/2011 that requires the authorities to terminate the investigation when a supporting party of the petition is found to import dumping goods”

KADI's statements in the two recitals are vague and contradicting each other. This reflects how KADI has neglected the very facts. While KADI attempted to deny in the EF, it is commonly known that those producers, perhaps except the Petitioner, imported BJLAS from the alleged countries in significant volume.

Statements of KADI on recital 42 is therefore baseless and evasive as in fact the producers could import under the name of trading company which mean those producers are the ultimate importer or users of imported BJLAS.

In recital 43 of the EF cited above, KADI however appears to acknowledged that import of BJLAS was made by those producers but it did not assess its impact on the totality of and causality examination in this investigation but it tried to evade to connect that facts with legal standing which we do not contest in this investigation. For the purpose of objective examination of injury and causality under Article 3 of the Agreement, KADI is required to make assessment of the facts that the Indonesian BJLAS producers are the main importers (users) or affiliated with the importers of BJLAS.

KADI should have realized that imports of BJLAS from the alleged countries were capitalized by the domestic BJLAS producers which means they themselves contributed to the increase of imports of BJLAS from both alleged countries.

It is therefore very much unreasonable when the Petitioner filed anti-dumping petition with KADI, while in reality it was other local BJLAS producers who imported but ironically declared their support of the Petitioner's petition.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

We highly questioned the reason of these three producers for not buying from the Petitioner but instead imported from the alleged countries, yet they supported the Petition

Imports of BJLAS from the two alleged countries by Indonesia BJLAS producers serve as undeniable facts that Indonesian BJLAS domestic industry as a whole is not capable of fulfilling the demand of downstream industry.

Whereas with the imports made by local BJLAS producers also show the impropriety of the initiation and current proceeding cannot be conducted objectively. KADI can never rationalize the proceeding correctly and objectively due to the presence of such significant volume of import.

69. **TANGGAPAN KADI:**

Data BPS merupakan data resmi dari Pemerintah Indonesia dimana data BPS yang dirujuk oleh KADI adalah publikasi resmi dari BPS yaitu Direktori Importir Indonesia tahun 2016, 2017 dan 2018. Berdasarkan data tersebut tidak ada produsen lokal baik pendukung (PT. Saranacentral Bajatama, Tbk., PT. Sunrise Steel, PT. Tata Metal Lestari dan PT. Java Pacific) maupun pemohon (PT. NS Bluescope Indonesia) yang melakukan importasi barang yang diselidiki melalui kode HS 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 dari kedua negara tertuduh selama periode penyelidikan. Selain itu, KADI juga sudah melakukan penyelidikan atas hal ini dengan mendapatkan rincian pembelian dari perusahaan yang juga telah diverifikasi.

Lack of explanation on the laws and facts presented to KADI in the EF

The facts that we mentioned in this legal brief has indeed already shown that the EF of KADI contains deficiencies as it did not properly examine the relevant laws and facts presented in the investigation.

As KADI did not issue a preliminary determination in this investigation but the EF, KADI is required to expand its presentation of analysis pursuant to the disclosure requirements under Article 12 of the Agreement.

In particular Article 12.2.1 of the Agreement provides as follows:

A public notice of the imposition of provisional measures shall set forth, or otherwise make available through a separate report, sufficiently detailed explanations for the preliminary determinations on dumping and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. (Emphasis added.)

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

In the absence of a preliminary determination, the quality of the EF issued by KADI should have referred to Article 12.2.1 cited above which KADI failed to do in the EF. We do not find anywhere in the EF that it referred to the matter of facts and law which have led to arguments being accepted or rejected.

Given this lack of explanation in the EF, KADI should not arrive at the present conclusion and should otherwise terminate this investigation.

70. TANGGAPAN KADI:

Laporan data utama yang disampaikan oleh KADI pada tanggal 30 Juli 2020 memuat hasil temuan sementara penyelidikan terkait produk yang diselidiki, kerugian, perhitungan dumping marjin, hubungan sebab akibat, faktor lain dan KADI juga telah memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan terkait hasil temuan KADI dalam laporan data utama. Sebagai tambahan, tanggapan yang disampaikan dalam laporan data utama telah ditanggapi dalam laporan akhir hasil penyelidikan.

Imposition of ADD is a form of excessive protection granted to the domestic industry

Currently imports of steel in general (including import of PPGL) is included in the scope of import limitation regulated under Minister of Trade Regulation. No. 110/2018 concerning the Provision on Imports of Iron or Steel, Alloy Steel, and its Derivative Products ("MOT Regulation 110/2018"), as last amended by MOT Regulation No. 03/2020.

Limitation on imports of steel includes BJLAS and we believe that anti-dumping duty is no longer necessary as import of BJLAS has been optimally restricted by MOT Regulation 110/2018.

Should the request for the imposition of ADD made by the Petitioners is granted, then it is clearly a form of excessive protection granted to the domestic industry.

71. TANGGAPAN KADI:

Tujuan dilakukannya penyelidikan anti-dumping adalah untuk menanggulangi praktik perdagangan yang tidak adil dan bukan sebagai sarana untuk membatasi atau melarang masuknya barang impor.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Imposition of Anti-Dumping Measures would be very harmful to the domestic downstream industry

Any imposition of anti-dumping duty would hurt Indonesian downstream users of the product concerned. Ultimately, it would cause damage to national housing project of the Government of Indonesia while there are undeniable facts that the Petitioner is unable to fulfill the demand of the domestic downstream industry and does not focus on the production and sales of the subject merchandise used for sector related to the Government of Indonesia's vital project on housing to low income society in Indonesia for which was the only reason why imports of the subject merchandise are inevitable for Indonesia.

It is therefore clear that any imposition of anti-dumping duty would not be in the interest of Indonesian industry as whole and therefore the current investigation should be terminated immediately.

72. TANGGAPAN KADI:

Perlu dicatat bahwa tugas dari KADI adalah melakukan penyelidikan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat hasil dari perdagangan yang tidak adil, sehingga dari hasil penyelidikan, KADI hanya merekomendasikan hasil temuan dalam rangka menegakkan *fair trade*.

Berdasarkan hasil penyelidikan KADI dampak dari pengenaan BMAD atas produk BJLAS terhadap industri hilir dan project sejuta rumah kurang dari 0.5% terhadap 1 unit rumah.

B.8.3 TANGGAPAN DARI IMPORTIR (APLUS PACIFIC)

Untuk produk BJLAS jenis Baja Paduan (Alloy Steel) yang diatur dalam HS. Code 7225 dan 7226 seharusnya tidak masuk dalam skema antidumping, karena produk tersebut tidak diproduksi didalam negeri dan sudah diatur dalam bentuk kebijakan teknis lainnya berupa pengendalian impor oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan (Surat Persetujuan Impor).

73. TANGGAPAN KADI:

Produk yang diselidiki oleh KADI merupakan *like product*/barang sejenis yang diproduksi oleh produsen di dalam negeri sesuai dalam pengertian dalam Article 2.6 ADA dan Pasal 1 ayat 10 PP 34/2011. Perlu dicatat bahwa tujuan dari penyelidikan anti-dumping bukanlah untuk pengendalian impor atau menghambat masuknya impor melainkan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
 ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
 YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

bertujuan untuk menanggulangi praktik perdagangan yang tidak adil akibat barang dumping yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri.

Menurut hemat kami dalam menentukan standing petitioner dimana Industri Dalam Negeri hanya diwakili oleh PT. NS Bluescope Indonesia (IDN) meskipun produksinya mencapai 34% dari produksi nasional namun demikian hasilnya akan sangat berbeda apabila seluruh industri nasional lainnya (IDN Lainnya) dilakukan penyelidikan.

74. TANGGAPAN KADI:

KADI telah mengevaluasi permohonan dari Pemohon, dan permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan *standing* yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 serta *Article 5.4 WTO Antidumping Agreement*.

Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011 berbunyi:

“Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:

- a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau*
- b. produksi **dari pemohon** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan** penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.”*

Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 berbunyi:

“Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila:

- a. produksi dari pemohon atau produksi dari **pemohon dan yang mendukung permohonan** berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan;”*

Article 5.4 WTO Antidumping Agreement berbunyi:

“An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of the like product,

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

*that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is **supported by those domestic producers** whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when **domestic producers expressly supporting the application** account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry." (footnote omitted)*

Presentase Pemohon dibandingkan dengan total produksi nasional BJLAS di tahun 2018 adalah 34%. Sedangkan persentase produsen domestik lainnya yang mendukung permohonan yaitu PT. Saranacentral Bajatama, Tbk., PT. Sunrise Steel dan PT. Java Pacific di tahun 2018 adalah 66%. Sehingga, total persentase Pemohon dan Pendukung adalah 100% (sudah lebih dari 50%). Oleh sebab itu permohonan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011. Selain itu sesuai persyaratan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011, persentase produksi dari Pemohon dan Pendukung dibandingkan dengan total produksi nasional pada periode penyelidikan adalah 100% (sudah lebih dari 25%) sehingga pasal ini juga sudah terpenuhi.

Dalam *Essential Facts* pada Tabel 3 menunjukkan IDN mengalami tren penurunan penjualan sebesar 19%, sedangkan IDN lainnya tidak mengalami penurunan (stagnant), dengan demikian penurunan sebesar 19% tersebut tidak menggambarkan kondisi penurunan penjualan secara nasional. KADI seharusnya lebih cermat menilai penurunan penjualan secara nasional, artinya penurunan yang terjadi di IDN tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam Penyelidikan Anti Dumping ini.

Berdasarkan jawaban KADI pada *Essential Facts* butir 44 menyatakan bahwa Kapasitas Produsen BJLAS Dalam Negeri sudah cukup memenuhi Kebutuhan Nasional (Dalam Negeri), apabila kapasitas produksi yang dimaksud disini adalah kapasitas ijin harus ada perhitungan yang jelas karena menurut hemat kami harus mempertimbangkan tingkat efisiensi kerja, kegagalan proses (reject) dan lain-lain, sehingga kapasitas real hanya bisa dicapai sebesar 75%-80% dari kapasitas mesin (kapasitas ijin). Dengan demikian kapasitas produksi yang disampaikan oleh produsen BJLAS dalam negeri masih jauh dari Kebutuhan Nasional.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Kemampuan supply dalam negeri pada dasarnya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan BJLAS nasional, sehingga impor masih sangat diperlukan, meskipun penerapan BMAD tidak melarang impor namun justru dengan pengenaan BMAD menimbulkan persaingan yang tidak fair, karena terdapat kecenderungan adanya praktek-praktek monopoli.

75. **TANGGAPAN KADI:**

Penjualan produsen dalam negeri lainnya naik seiring dengan kenaikan konsumsi nasional yang naik hingga 42% di tahun 2018. Namun, kenaikan penjualan produsen dalam negeri tidak sebanding dengan kenaikan impor dari negara tertuduh yang naik pesat di tahun 2018 dengan pangsa pasar 59%. Lebih lanjut, pangsa pasar IDN lainnya juga mengalami penurunan tren selama 2016 – 2018 sebesar 2%.

Kapasitas produsen BJLAS di Indonesia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada saat ini, terutama mempertimbangkan adanya peningkatan kapasitas dari PT. Sunrise Steel dan PT Java Pasific, serta kehadiran PT. Tata Metal Lestari yang mulai beroperasi di akhir tahun 2019. Sehingga pada saat ini total kapasitas nasional sudah memenuhi lebih dari 100% dari konsumsi nasional

Sekarang ini utilisasi kapasitas Pemohon dan IDN lainnya masih sangat rendah dan tidak optimal yang diakibatkan oleh persaingan yang tidak fair dengan impor barang dumping yang harganya sangat murah. Secara umum selama periode penyelidikan trend utilitasi Pemohon hanya sebesar 52-66% dan cenderung menurun sebesar 7%;

Selain itu, impor baik dari kedua negara yang diselidiki maupun dari negara lainnya masih dapat masuk ke pasar Indonesia bahkan bilamana nantinya dikenakan BMAD terhadap impor dari Cina dan Vietnam, impor masih tetap boleh masuk namun hanya perlu membayar BMAD agar harganya menjadi *fair* (tidak dumping).

Meskipun tidak adanya larangan terhadap produsen yang bersifat terintegrasi secara vertical (Produsen Afiliasi) tetapi dengan adanya proteksi dari Pemerintah berupa BMAD maka perlakuan bisnis menjadi bermasalah dan tidak fair.

76. **TANGGAPAN KADI:**

Sebagaimana dijelaskan di poin sebelumnya, BMAD bukanlah tindakan proteksi dari pemerintah, melainkan *a trade remedy measure* yang sangat lazim digunakan oleh negara-negara WTO lainnya untuk menciptakan *a level playing field* ketika ada suatu negara anggota lain yang melakukan praktek *unfair trade* dengan dumping. Impor baik dari kedua negara yang diselidiki maupun dari negara lainnya masih dapat masuk ke pasar Indonesia bahkan bilamana nantinya dikenakan BMAD terhadap impor dari Cina

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

dan Vietnam, impor masih tetap boleh masuk namun hanya perlu membayar BMAD agar harganya menjadi *fair* (tidak dumping).

Secara umum meskipun teknologi proses antara Industri BJLAS RRT maupun Vietnam sama dengan Industri Dalam Negeri tetapi kemampuan menghasilkan produk seluruh spesifikasi BJLAS tidaklah sama, karena terdapat factor-faktor sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Jumlah Line, karena dalam satu line sulit kiranya untuk menghasilkan seluruh ukuran ketebalan.
- b. Tingkat efisiensi untuk menghasilkan ukuran ketebalan yang lebih tipis diperlukan fokus produksi dalam satu line untuk menghindari kegagalan proses produksi (reject).
- c. Kapasitas yang dicapai untuk menghasilkan ukuran ketebalan yang lebih tipis menjadi lebih rendah.

Pada kenyataannya PT. Aplus Pacific selama ini merasa kesulitan untuk mendapatkan supply BJLAS ketebalan 0.20mm – 0.25mm dari industri dalam negeri berupa penolakan atau jadwal pengiriman yang cukup lama dan jika diperlukan kami dapat menyampaikan data fakta tersebut.

77. TANGGAPAN KADI:

KADI sudah melakukan verifikasi dimana Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon mampu memproduksi BJLAS dengan ketebalan 0.2 mm sampai dengan 0.3 mm dan Pemohon juga menjual BJLAS dengan ketebalan tersebut dengan nama brand seperti Abadi, Bluescope Zacs, dan Perisai. Hal ini sudah dibuktikan melalui sample invoice yang diberikan Pemohon kepada KADI pada saat verifikasi.

Untuk klaim yang disampaikan oleh PT. Aplus Pacific terkait kesulitan mendapatkan supply BJLAS dengan ketebalan 0,20mm – 0,25mm yang berupa penolakan maupun jadwal pengiriman, karena klaim tersebut tidak disertai dokumen pendukung maka KADI tidak dapat mempertimbangkan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh KADI ditemukan bahwa IDN menjual BJLAS dengan ketebalan 0,20mm – 0,25mm dan tidak ada penolakan maupun jadwal pengiriman berdasarkan klaim yang disampaikan oleh PT. Aplus Pacific.

B.8.4 TANGGAPAN DARI ASOSIASI (APBRI DAN ASBARINDO)

Pertama-tama, sebagaimana disampaikan dalam Tanggapan, sangat jelas bahwa terdapat 2 produsen dalam negeri yang menjadi pendukung penyelidikan yakni

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Sarana Steel dan Sunrise Steel yang melakukan pengimporan BJLAS dari negara tertuduh melalui PT. Great Fortune dan Tata Metal (keduanya merupakan pelanggan Bluescope sendiri).

KADI di dalam Laporan memberikan tanggapan yang evasif dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam WTO Anti-Dumping Agreement (“ADA”) maupun PP 34/2011 yang mewajibkan otoritas menghentikan penyelidikan bilamana ditemukan adanya pendukung permohonan yang melakukan importasi barang dumping. Namun demikian, tanggapan KADI tersebut sama sekali tidak menanggapi esensi yang kami sampaikan dalam Tanggapan, dimana adanya impor BJLAS dari kedua negara yang dituduh dumping yang dilakukan oleh produsen BJLAS sendiri merupakan bukti dan fakta yang tak terbantahkan bahwa produsen BJLAS Indonesia secara keseluruhan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sektor hilir berbasis BJLAS dalam negeri.

Lebih jauh, menjadi sangat ironis dan menimbulkan tanda tanya besar ketika kedua produsen yang melakukan pengimporan dalam jumlah signifikan (yang berarti berkontribusi besar terhadap “kerugian” yang dialami Pemohon) justru mendukung penyelidikan ini. Fakta ini juga menyebabkan inisiasi penyelidikan yang dilakukan KADI menjadi tidak objektif.

78. TANGGAPAN KADI:

PT. Great Fortune dan PT. Tata Logam bukanlah Pemohon maupun pendukung dalam penyelidikan ini. APBRI juga tidak memberikan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa PT. Great Fortune dan PT. Tata Logam adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Pemohon yaitu PT. NS Bluescope Indonesia atau pendukung permohonan yaitu PT. Saranacentral Bajatama, Tbk., PT. Sunrise Steel, PT. Tata Metal Lestari dan PT. Java Pacific. Kalaupun ada bukti yang memperkuat tuduhan tersebut, berdasarkan Pasal 1 butir 17 PP 34/2011 dan *Article 4.1 WTO Antidumping Agreement* otoritas KADI adalah hanya dapat mengecualikan suatu produsen yang terafiliasi dengan importir barang dumping dari cakupan industri dalam negeri. Bila hal ini terjadi maka proporsi standing Pemohon akan menjadi lebih besar. Tidak ada satupun pasal baik dalam *WTO Antidumping Agreement* maupun PP 34/2011 yang mewajibkan otoritas menghentikan penyelidikan bilamana ditemukan adanya pendukung permohonan yang melakukan importasi barang dumping.

Terlebih lagi, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, impor dari PT. Great Fortune, PT. Sarana Steel dan PT. Tata Logam selama periode penyelidikan jumlahnya sangat kecil dan tidak signifikan yaitu hanya berkisar 10% - 12% dari negara tertuduh.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Kedua, kami menyampaikan secara tegas dalam Tanggapan bahwa keseluruhan produsen BJLAS dalam negeri (termasuk Bluescope sendiri) terintegrasi secara vertikal dengan industri hilir berbasis BJLAS, yang kemudian bersaing secara langsung dengan para anggota ASBARINDO dan APBRI.

KADI sekali lagi memberikan jawaban yang menyesatkan dengan mengklaim bahwa hal ini tidak dilarang dalam ADA maupun PP 34/2011, bahkan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pemohon dalam penyelidikan anti-dumping di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami mencatat bahwa KADI sama sekali tidak menganalisa dampak dari kondisi ini dalam Laporan KADI, dimana adanya integrasi vertikal dari produsen dalam negeri menyebabkan produsen-produsen dalam negeri untuk lebih berfokus pada pemenuhan suplai dari afiliasi hilirnya, dimana hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

79. TANGGAPAN KADI:

Berdasarkan hasil penyelidikan maupun hasil verifikasi ditemukan bahwa pada periode penyelidikan, IDN pemohon melakukan penjualan ke afiliasi hilir hanya sekitar 6% dan IDN pendukung hanya sekitar 1% dari seluruh penjualan BJLAS dalam negeri dan disamping itu dengan meningkatnya konsumsi nasional IDN BJLAS juga melakukan penambahan kapasitas produksinya, akan tetapi IDN pemohon dan pendukung hanya dapat memenuhi kurang dari 50% untuk permintaan BJLAS nasional, selebihnya berasal dari barang impor. Sebagai tambahan informasi, konsumsi nasional mayoritas dipenuhi oleh barang impor yang mengandung dumping yang berasal dari RRT dan Vietnam.

Dalam PP 34/2011 maupun *Anti Dumping Agreement* tidak melarang bahwa Pemohon tidak boleh terintegrasi secara vertikal dengan industri hilirnya. Bahkan merupakan hal yang sudah lazim dalam penyelidikan anti-dumping baik di Indonesia maupun di negara-negara WTO lainnya dimana Pemohon penyelidikan antidumping merupakan perusahaan yang terintegrasi vertikal.

Faktanya, keseluruhan produksi dari produsen BJLAS lokal hanya dapat memenuhi kurang dari 50% dari total permintaan BJLAS nasional. Sebagaimana telah kami utarakan pada saat dengar pendapat publik, serta didukung pula oleh para importir antara lain oleh Aplus dan Wijaya Steelindo, terdapat banyak tipe dan ketebalan yang tidak dapat dipenuhi karena tidak diproduksi sama sekali oleh Pemohon. Bahkan untuk order barang dari Pemohon yang dapat diproduksi dan telah disepakati seringkali mengalami keterlambatan maupun penundaan dalam

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

pengiriman untuk waktu yang cukup lama. Hal ini sudah berlangsung bahkan ketika pengenaan BMAD belum dilakukan.

80. TANGGAPAN KADI:

Telah KADIanggapi pada resital 78.

Pada saat ini total kapasitas nasional sudah memenuhi lebih dari 100% dari konsumsi nasional. Berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil verifikasi, Pemohon mampu memproduksi BJLAS dalam range ketebalan yang diperlukan oleh pasar yang sudah dibuktikan melalui sample invoice yang diberikan Pemohon kepada KADI pada saat verifikasi, sehingga klaim adanya tipe barang yang tidak dapat diproduksi oleh Pemohon tidak relevan dan KADI telah menindaklanjuti mengenai klaim keterlambatan dan penundaan (yang tidak disertai dengan bukti pendukung) yang disampaikan tidak benar adanya.

Dengan adanya struktur pasar BJLAS yang cenderung terintegrasi secara vertikal dan terlebih oligopolistik ekstrem impor yang dilakukan oleh para anggota ASBARINDO dan APBRI merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari untuk dapat bersaing secara kompetitif dengan afiliasi hilir dari produsen BJLAS lokal termasuk Bluescope.

Ketika KADI menyampaikan bahwa setelah ada penerapan BMAD impor tetap dapat dilakukan dari negara tertuduh (dengan membayar BMAD), KADI sama sekali menutup mata terhadap fakta bahwa hal ini akan semakin melemahkan daya saing para anggota ASBARINDO dan APBRI untuk dapat bersaing dengan afiliasi hilir dari para produsen BJLAS nasional.

81. TANGGAPAN KADI:

Kapasitas Pemohon beserta IDN lainnya sudah dapat mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dimana dengan adanya penambahan kapasitas dari Sunrise dan Java Pacific serta kehadiran produsen baru yaitu PT. Tata Metal Lestari.

KADI ingin menekankan bahwa pengenaan BMAD sama sekali tidak melarang maupun menghambat masuknya impor baik dari negara tertuduh maupun negara lainnya, tujuan penyelidikan anti dumping adalah untuk menanggulangi perdagangan yang tidak adil akibat barang dumping yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi ditemukan bahwa penjualan antar afiliasi hilir IDN pemohon hanya sebesar 6% dan penjualan antar afiliasi hilir IDN pendukung

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

hanya 1%. Hal tersebut menunjukkan tidak tepatnya anggapan hubungan antar afiliasi dengan IDN tersebut dapat melemahkan daya saing industri hilir lainnya.

Ketiga, analisa kerugian dalam penyelidikan ini tidak valid karena data kerugian Pemohon hanya berasal dari data Bluescope yang mewakili 34% dari total produksi nasional. KADI dalam Laporan menanggapi bahwa Bluescope telah memenuhi persyaratan legal standing sebagai industri dalam negeri sebagaimana diatur dalam Article 5.4 ADA dan Pasal 4.3 juncto Pasal 6.1.a PP 34/2011.

Namun demikian, kami sama sekali tidak mempertanyakan mengenai masalah legal standing Pemohon. Kami mencatat bahwa KADI sama sekali tidak menganalisa dan menanggapi fakta bahwa produsen BJLAS dalam negeri lainnya berada dalam kondisi yang sangat sehat dan tidak mengalami kerugian akibat impor dari negara-negara tertuduh. Apabila produsen lain mengalami kerugian akibat impor, tentunya mereka akan menjadi bagian dari Pemohon, bukan hanya sebagai pendukung dari petisi yang diajukan Pemohon.

Bahkan kami mencatat kinerja penjualan BJLAS yang sangat baik dari salah satu produsen BJLAS dalam negeri, PT. Saranacentral Bajatama, Tbk. ("Sarana"), sebagaimana terlihat dalam Laporan Keuangan tahun 2018, sebagai berikut:

	2016	2017	2018
Volume Produksi BJLAS (dalam MT) (Sumber: Hal. 5 Annual Report 2017 dan Hal. 5 Annual Report 2018, PT Saranacentral Bajatama Tbk.)	38.268,60	47.881,80	53.113,40
Penjualan bersih (All Product) (dalam Juta Rupiah) Setelah retur dan diskon*	978.840,64	1.218.317,83	1.279.809,88
Penjualan bersih (BJLAS) dalam Juta Rupiah*	384.770,17	557.265,61	726.000,97
	39,3%	45,5%	56,6%
(Sumber: Hal. 37 Annual Report 2017, dan Hal. 38 Annual Report 2018, PT Saranacentral Bajatama Tbk.)			

Selama periode investigasi, terlihat bahwa Sarana mampu meningkatkan produksi BJLAS dari 38.268,60 MT pada tahun 2016 menjadi 47.881,80 MT pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 meningkat kembali sebesar 53.113,40 MT. Hal ini bertolak belakang dengan Pemohon yang justru mengalami penurunan produksi.

Dari sisi penjualan bersih, sepanjang 2016 hingga 2018 Sarana mampu terus meningkatkan penjualan produk BJLASnya. Perkembangan penjualan produk BJLAS bahkan meningkat pada porsi total penjualan bersihnya dari 39,3% menjadi 56,6%.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Dari data–data kinerja Sarana tersebut, KADI seharusnya melihat hal ini sebagai indikasi adanya anomali kinerja Pemohon dibandingkan dengan produsen BJLAS Indonesia lainnya. Perlu dicatat bahwa Sarana merupakan salah satu dari produsen dalam negeri yang mendukung penyelidikan dan datanya telah diverifikasi oleh KADI, sehingga tidak mungkin apabila KADI tidak mengetahui kinerja yang positif dari Sarana sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila kinerja semua produsen BJLAS lain dalam keadaan sangat sehat, maka sangat jelas bahwa impor BJLAS dari kedua negara yang dituduh tidak berdampak negatif bagi industri dalam negeri secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon merupakan kesalahan mereka sendiri (*self-inflicted*) yang tidak ada hubungannya dengan impor BJLAS, karena hanya Pemohon sendiri yang mengalami kerugian sementara produsen BJLAS dalam negeri lainnya tetap berada dalam kondisi yang sangat baik.

82. TANGGAPAN KADI:

Telah KADI tanggapi pada resital 52

Kami mencatat kinerja Pemohon sebagaimana disampaikan dalam Tabel 4 EF sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
1.	Penjualan dalam negeri	MT	100	114	91	(4)
2.	Penjualan dalam negeri	USD	100	134	113	6
3.	Laba Operasi	USD	100	118	(58)	-
4.	Harga dalam negeri	USD/M T	100	117	123	11
5.	Market Share	%	100	94	67	(18)
6.	Produksi	MT	100	111	87	(7)
7.	Produktivitas	MT/Org	100	116	92	(4)
8.	Kapasitas	MT	100	100	100	-
9.	Utilisasi Kapasitas	%	100	111	87	(7)
10.	Persediaan	MT	100	72	82	(9)
11.	Tenaga kerja	Org	100	96	94	(3)
12.	Upah	IDR	100	101	101	1
13.	Arus kas*	USD	100	19	62	(21)
14.	ROI*	%	100	100	(25)	-
15.	<i>Growth*</i>	%	100	95	(132)	-
16.	Kemampuan meningkatkan modal*	%	100	90	89	(6)

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya diatas, data dalam analisa kerugian Laporan KADI hanya merefleksikan kinerja Pemohon, yang merepresentasikan 34% dari total produksi dalam negeri.

Terdapat 66% produksi industri dalam negeri lainnya, 2 diantaranya bahkan sudah diverifikasi oleh KADI (Sunrise dan Sarana), yang tidak dimasukkan dalam data analisa kerugian yang disampaikan dalam Laporan KADI.

Hal ini mengindikasikan adanya pendekatan yang bersifat “tebang pilih” (Cherry Picking) dalam analisa kerugian yang dilakukan oleh KADI, sehingga hasil analisa yang dilakukan menjadi tidak akurat dan patut dipertanyakan. Apabila data-data kinerja dari kedua produsen pendukung yang sudah diverifikasi tersebut dimasukkan kedalam analisa kerugian, maka akan jelas terlihat bahwa secara keseluruhan tidak ada kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari impor BJLAS.

83. TANGGAPAN KADI:

Perihal laporan KADI hanya merefleksikan kinerja Pemohon, yang merepresentasikan 34% dari total produksi dalam negeri telah ditanggapi pada resital 49. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh KADI pada analisa indikator kinerja ekonomi IDN pada resital 34-41 terlihat bahwa selama periode penyelidikan yaitu 2016-2018 IDN terus mengalami penurunan kinerja ekonominya yang terlihat pada indikator penjualan dalam negeri, market share, produksi, produktivitas, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, arus kas, ROI, *growth* dan kemampuan meningkatkan modal.

Penjualan Dalam Negeri, baik secara nilai maupun volume penjualan, menunjukkan kinerja yang relatif baik selama periode 2016, 2017, dan IP. Volume penjualan menunjukkan peningkatan sebesar 14 indeks pada 2017, sebelum kemudian menurun hingga 91 indeks pada IP. Namun demikian, nilai penjualan masih berada pada tingkat yang lebih tinggi pada IP (13 indeks) apabila dibandingkan dengan periode awal pada 2016.

84. TANGGAPAN KADI:

Penjualan Pemohon pada tahun 2017 memang mengalami peningkatan, namun apabila dilihat secara relatif terhadap konsumsi nasional maka pangsa pasar penjualan pemohon pada tahun 2017 menurun sebesar 10 indeks poin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2018 penjualan Pemohon mengalami penurunan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

yang signifikan yaitu menurun sebesar 23 indeks poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menurun sebesar 9 indeks poin jika dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga secara umum trend penjualan Pemohon menurun selama periode penyelidikan sebesar 4.42% yang mana hal ini tentunya menunjukkan kinerja yang buruk.

Sementara adanya kenaikan pada penjualan secara *value* disebabkan karena adanya peningkatan harga dalam negeri selama periode penyelidikan. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan harga dalam negeri disebabkan karena biaya produksi Pemohon terus meningkat karena kenaikan bahan baku CRC yang menjadi sumber utama bahan baku. Selain itu, kenaikan ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan biaya produksi sehingga Pemohon terus menekan profit margin tiap tahunnya, hingga menjual rugi di tahun 2018.

Produksi dan utilisasi kapasitas menunjukkan penurunan pada IP, sementara pada periode yang sama tingkat konsumsi nasional justru menunjukkan peningkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor berikut: (i) ekspansi produsen BJLAS Indonesia lainnya; (ii) pabrik baru yang didirikan dari pelanggan Pemohon; (iii) meningkatkan permintaan BJLAS nasional sebesar 0,2mm-0,3mm yang memang menjadi fokus atau fokus Pemohon pada (iv) penurunan konsumsi nasional BJLAS Indonesia di atas 0,3mm; dan (v) penggunaan sendiri (captive use) oleh Pemohon.

Pertumbuhan konsumsi BJLAS lebih disebabkan adanya peningkatan konsumsi disegmen di luar kemampuan produksi Bluescope dan bahkan produsen BJLAS lokal lainnya.

Terkait kapasitas produksi terpasang, dalam Tanggapan NCC, ASBARINDO dan APBRI mempertanyakan akurasi analisis kerugian yang disampaikan dalam Petisi, khususnya ketika pemohon sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait kapasitas produksi Pemohon.

Penting untuk dicatat bahwa fasilitas produksi Pemohon merupakan fasilitas terintegrasi untuk produksi 2 macam produk: BJLAS (Galvalume) dan BJLAS Warna, dimana utilisasi kapasitas untuk produk BJLAS Warna akan sangat tergantung utilisasi kapasitas untuk Galvalume. Tanpa adanya pemisahan yang jelas antara BJLAS Warna dan Galvalume, maka sangat mungkin kapasitas produksi Pemohon yang tercantum dalam Petisi menjadi over state, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi analisa kerugian secara keseluruhan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Kami mencatat bahwa KADI sama sekali tidak menanggapi dan memberikan analisis apapun terhadap hal tersebut diatas.

85. TANGGAPAN KADI:

- (i) Produksi Pemohon tidak hanya terfokus pada produk BJLAS dengan ketebalan diatas 0.3 mm saja, Pemohon mampu memproduksi produk dengan ketebalan 0.2 mm sampai dengan 0.3 mm. Pemohon juga menjual BJLAS dengan ketebalan tersebut dengan nama brand seperti Abadi, Bluescope Zacs, dan Perisai. Hal ini sudah dibuktikan melalui sample invoice yang diberikan Pemohon kepada KADI pada saat verifikasi.
- (ii) Ekspansi yang dilakukan oleh produsen BJLAS lainnya bertujuan untuk memenuhi konsumsi nasional. Namun, pada saat ini investasi yang sudah dilakukan IDN tidak dipergunakan secara optimal dikarenakan impor barang dumping, sehingga tingkat utilisasi Pemohon dan IDN lainnya tetap rendah.
- (iii) Seluruh kapasitas terpasang yang Pemohon sudah sampaikan merupakan kapasitas untuk memproduksi BJLAS dan tidak termasuk kapasitas Pemohon untuk pengecatan, dan hal ini juga sudah diverifikasi KADI pada saat di lapangan. Perlu dicatat bahwa BJLAS warna merupakan BJLAS bare yang kemudian dicat sehingga kapasitas BJLAS warna dihitung dari kapasitas berdasarkan fasilitas pengecatan yang dimiliki oleh Pemohon.

Adanya penurunan terhadap beberapa kinerja Pemohon, seperti misalnya penjualan dan profit, juga dipengaruhi oleh persaingan dengan produsen nasional lainnya, termasuk Java Pasific. Lebih lanjut, terdapat produsen BJLAS nasional yang melakukan importansi BJLAS secara signifikan untuk memenuhi kebutuhannya dan/atau dipakai sendiri pada industri hilir mereka.

Dengan demikian, dasar klaim kerugian Bluescope tidak berdasar karena yang melakukan importansi BJLAS dari kedua negara yang dituduh ternyata adalah produsen BJLAS lokal sendiri yang justru menjadi pendukung penyelidikan.

86. TANGGAPAN KADI:

- (i) Perlu dicatat bahwa penjualan produsen dalam negeri lainnya naik seiring dengan kenaikan konsumsi nasional yang naik hingga 42% di tahun 2018. Namun, kenaikan penjualan produsen dalam negeri tidak sebanding dengan kenaikan impor dari negara tertuduh yang naik pesat di tahun 2018 dengan pangsa pasar 59%. Lebih

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

lanjut, pangsa pasar IDN lainnya juga mengalami penurunan tren selama 2016 – 2018 sebesar 2%;

- (ii) Terkait masalah importasi, berdasarkan data resmi dari BPS tidak ada produsen lokal baik pendukung (PT. Saranacentral Bajatama, Tbk., PT. Sunrise Steel, PT. Tata Metal Lestari dan PT. Java Pacific) maupun pemohon (PT. NS Bluescope Indonesia) yang melakukan importasi barang yang diselidiki melalui kode HS 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 dari kedua negara tertuduh selama periode penyelidikan.

Tingkat persediaan Pemohon juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana pada 2017 dan IP berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan periode awal 2016.

87. TANGGAPAN KADI:

Penurunan persediaan Pemohon di tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh kenaikan penjualan Pemohon di tahun tersebut, mengingat bahwa nature bisnis Pemohon merupakan *job order* dimana barang baru diproduksi bila ada pesanan dari konsumen. Namun, di tahun 2018 terjadi peningkatan persediaan yang disebabkan adanya penurunan penjualan di tahun tersebut.

Tingkat tenaga kerja dan upah berada pada level yang relatif stabil selama periode analisa kerugian.

88. TANGGAPAN KADI:

Tingkat tenaga kerja Pemohon mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 untuk meningkatkan produktivitas agar sesuai dengan keperluan produksi. Pengurangan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan perusahaan adalah untuk menanggapi performa bisnis yang sangat menurun dan merugi. Sedangkan, untuk upah Pemohon melakukan pengkajian ulang atas penyesuaian gaji di tenaga kerja.

Sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam permohonannya dan juga dikonfirmasi KADI dalam EF, khusus indikator Arus Kas, ROI, dan Kemampuan Meningkatkan Modal merupakan indikator kinerja yang terkonsolidasi dengan produk lainnya, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja untuk barang yang diselidiki.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

Sangat jelas berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa industri BJLAS dalam negeri tidak mengalami kerugian sebagai akibat dari impor BJLAS dari Vietnam dan RRT.

89. TANGGAPAN KADI:

Apabila data untuk barang yang diselidiki tidak dapat dipisahkan maka KADI dapat menggunakan data yang sifatnya lebih luas tetapi mencakup barang yang diselidiki. Hal ini juga ditegaskan oleh Panel dalam kasus *EC – Tube or Pipe Fittings* yang menyatakan: *"[W]hile data and information pertaining specifically to the 'like product' is to be used to the extent possible, the Agreement also envisages resort to a broader spectrum of data where separate identification of like product specific data is not possible. It is therefore permissible for an investigating authority to assess the effects of the dumped imports by the examination of the production of a broader range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided if likeproduct-specific information is not available."*

Keempat, bukti permulaan dumping yang menjadi dasar diajukannya petisi kepada KADI dilakukan berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana dalam menghitung konstruksi atas normal value BJLAS asal Vietnam, Pemohon mengacu kepada struktur biayanya sendiri. KADI menanggapi dan mengklaim bahwa metode konstruksi nilai normal yang dilakukan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Article 5.2 ADA maupun best practice pada negara lain seperti misalnya India, sehingga sudah cukup untuk menginisiasi penyelidikan anti-dumping.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan sesungguhnya adalah struktur biaya Bluescope tidak dapat digunakan sebagai benchmark yang valid untuk menentukan nilai normal (harga domestik) produsen di RRT dan Vietnam karena dapat diyakini keduanya jauh lebih efisien dibandingkan dengan Bluescope.

Permasalahan selanjutnya adalah ketika nilai normal yang tidak valid tersebut kemudian dibandingkan dengan harga ekspor dari kedua negara tersebut untuk menentukan dumping margin. Artinya, di dalam permohonannya, Bluescope telah menggunakan dua jenis data dari sumber yang sama sekali berbeda (nilai normal adalah data Bluescope sendiri, namun harga ekspor berasal dari RRT dan Vietnam), dimana hasil perhitungan jelas menjadi semakin tidak valid dan dipertanyakan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

90. **TANGGAPAN KADI:**

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Laporan Data Utama pada resital 48 yang juga sesuai dengan ketentuan Article 5.2 (iii) *Anti Dumping Agreement*, bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh Pemohon sudah cukup bagi KADI untuk menginisiasi penyelidikan anti-dumping. Bukti adanya dumping yang ada dalam permohonan merupakan bukti permulaan (*prima facie*) yang sifatnya berbeda dengan bukti yang akan digunakan dalam pembuatan *essential facts* atau *final disclosure* oleh KADI.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi ditemukan bahwa seluruh perusahaan BJLAS yang berasal dari RRT dan Vietnam melakukan dumping.

Kelima, kami tidak menemukan adanya analisa yang memadai atas hubungan antara impor dumping dengan klaim kerugian dari Pemohon. KADI menyebutkan bahwa Tata Metal masih merupakan pelanggan dari Bluescope selama periode penyelidikan, namun disisi lain KADI sama sekali tidak membantah fakta bahwa Tata Metal masih melakukan importasi secara signifikan, yang menegaskan fakta bahwa suplai dari industri dalam negeri masih tidak memadai dimana telah kami jelaskan diatas bahwa industri dalam negeri hanya mampu memenuhi 50% dari total kebutuhan nasional.

91. **TANGGAPAN KADI:**

Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi yang disampaikan melalui laporan ini pada analisa perhitungan margin dumping, analisa indikator kinerja ekonomi IDN, dan hubungan kausal antara keduanya terbukti bahwa impor dumping yang dilakukan oleh RRT dan Vietnam menyebabkan kerugian terhadap IDN.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh KADI, Tata Metal selaku pendukung tidak melakukan importasi BJLAS dan pada periode penyelidikan Tata Metal belum beroperasi. Selain itu kemampuan kapasitas nasional sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional.

KADI juga sama sekali tidak menganalisa dampak dari kinerja PT Java Pasific terhadap Bluescope, dan malah semata-mata menyakahkan impor yang mengambil alih konsumsi nasional yang meningkat dan menyebabkan pangsa pasar Pemohon menurun.

92. **TANGGAPAN KADI:**

Selain melakukan penyelidikan ke Pemohon, KADI juga sudah melakukan penyelidikan ke para pendukung dimana KADI sudah mengevaluasi bahwa IDN lainnya juga terganggu

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

seperti Pemohon dengan adanya impor barang dumping yang menguasai pasar domestik di Indonesia.

Data yang ada menunjukkan adanya penurunan penjualan dalam negeri lainnya secara relatif sebesar 4% walaupun terdapat peningkatan secara absolut sebesar 36% pada tahun 2018. Perlu dicatat bahwa peningkatan impor dari negara tertuduh baik secara absolute maupun secara relatif merupakan yang terbesar. Secara absolut impor mengalami peningkatan sebesar 62% dan secara relatif mengalami peningkatan sebesar 14% di tahun 2018. Peningkatan impor ini melebihi peningkatan konsumsi nasional yang hanya sebesar 42% di tahun 2018.

Faktanya, Bluescope tidak mampu untuk memenuhi pertumbuhan dari BJLAS karena semakin besarnya permintaan BJLAS pada sektor hilir untuk produk BJLAS dengan ketebalan 0,2 – 0,3 mm, yang berada diluar fokus produksi dari Bluescope maupun produsen BJLAS dalam negeri lainnya.

Kami mencatat KADI sama sekali tidak memberikan analisis mengenai ketidakmampuan Pemohon untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri untuk kebutuhan BJLAS dengan ketebalan 0,20-0,30mm.

Sangat jelas bahwa impor BJLAS tidak bersaing dengan produsen BJLAS lokal termasuk Bluescope karena dilakukan untuk mengisi kekurangan pasokan nasional yang signifikan dan dalam jumlah tidak sersaing dalam segmen pasar yang sama.

93. TANGGAPAN KADI:

KADI telah menyampaikan tanggapannya dalam resital 49 – 50 Laporan Data Utama. Impor BJLAS dengan ketebalan 0.2 mm sampai dengan 0.3 mm masuk dalam cakupan barang yang diselidiki KADI dalam penyeldikan ini. KADI juga sudah melakukan verifikasi dimana Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon mampu memproduksi BJLAS dengan ketebalan 0.2 mm sampai dengan 0.3 mm yang didukung dengan bukti penjualan berupa invoice yang diperoleh KADI pada saat verifikasi.

Keenam, kami mencatat bahwa Laporan KADI sama sekali tidak memberikan analisa mengenai dampak pengenaan BMAD terhadap industri hilir berbasis BJLAS, termasuk para anggota APBRI dan ASBARINDO.

Pengenaan BMAD akan mengakibatkan terhentinya suplai bahan baku bagi industri hilir, dimana Pemohon hanya dapat memenuhi kurang dari 50% dari total kebutuhan pasar domestik.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

94. **TANGGAPAN KADI:**

Pengenaan BMAD sama sekali tidak melarang maupun menghambat masuknya impor baik dari negara tertuduh maupun negara lainnya. Selain itu, kapasitas Pemohon beserta IDN lainnya sudah dapat mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dimana dengan adanya penambahan kapasitas dari Sunrise dan Java Pacific serta kehadiran produsen baru yaitu PT. Tata Metal Lestari.

Pemohon serta produsen domestik lainnya masih tidak dapat memenuhi pesanan dari pabrik hilir di Indonesia, sehingga para anggota kami termasuk produsen BJLAS lokal sendiri harus melakukan impor dalam jumlah sangat signifikan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya.

95. **TANGGAPAN KADI:**

Tanggapan telah disampaikan pada resital 79 dan 80

Di sisi lain, keseluruhan industri hilir adalah murni perusahaan dalam negeri yang menyumbang lapangan kerja sebesar 11,500 (sebelas ribu lima ratus) tenaga kerja sekaligus memberikan kontribusi fiskal yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional, terlebih karena sifatnya sebagai industri hilir maka produk-produknya merupakan produk yang banyak digunakan secara langsung oleh masyarakat luas terutama sektor pelayanan umum masyarakat.

Pengenaan BMAD juga akan semakin memperkuat posisi oligopolistik produsen BJLAS lokal yang terintegrasi secara vertikal. Impor selama ini juga menjadi penyeimbang dan diversifikasi sumber bahan baku bagi industri hilir.

Dengan demikian, mengingat pentingnya pasokan bahan baku yang memadai bagi kelangsungan hidup industri hilir pengguna BJLAS di Indonesia, maka kami meminta agar KADI menghentikan penyelidikan yang sedang berjalan.

96. **TANGGAPAN KADI:**

Dalam melakukan tugasnya KADI sama sekali tidak mengutamakan kepentingan manapun dan tidak juga bisa melakukan tebang pilih dalam mempertimbangkan kepentingan mana yang harus didahulukan. Dalam hal ini tugas KADI adalah melakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah terjadi dumping, kerugian dan hubungan kausal antara keduanya. Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa RRT dan Vietnam melakukan dumping serta terjadi kerugian oleh IDN dan terjadi hubungan kausal antara dumping dan kerugian.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

C. KESIMPULAN

97. Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menyimpulkan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan resital 33, ditemukan margin dumping untuk perusahaan eksportir/eksportir produsen yang berasal dari RRT sebesar 3,07% - 55,43% dan Vietnam sebesar 3,01% - 49,20%.
 - b. Berdasarkan analisis kinerja ekonomi Industri Dalam Negeri pada 36-40 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan yaitu 2016-2018 IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan menurunnya indikator kinerja pada penjualan dalam negeri, *market share*, produksi, produktivitas, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, arus kas, ROI, *growth*, dan kemampuan meningkatkan modal.
 - c. Terdapat hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dinyatakan dengan:
 - i. Adanya dampak volume secara absolut dan relatif terhadap konsumsi nasional dimana pangsa impor dumping dari RRT dan Vietnam pada periode 2016-2018, sebagaimana yang terdapat pada resital 42 dan 43.
 - ii. Adanya dampak harga dalam bentuk *price undercutting* oleh RRT dan Vietnam selama periode 2016-2018, sebagaimana yang terdapat pada resital 44.
98. Berdasarkan resital 97 di atas, KADI menyimpulkan bahwa kerugian material yang dialami IDN diakibatkan oleh barang impor dumping yang berasal dari RRT dan Vietnam. Peningkatan impor barang dumping secara absolut dan relatif serta terjadinya *price undercutting* dari RRT dan Vietnam menyebabkan IDN mengalami kerugian material dalam bentuk menurunnya penjualan dalam negeri, *market share*, produksi, produktivitas, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, arus kas, ROI, *growth* dan kemampuan meningkatkan modal.

D. REKOMENDASI

99. Berdasarkan bukti, kajian, analisa, dan mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan dan hasil verifikasi, maka KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor BJLAS yang berasal dari RRT dan Vietnam dengan nomor pos tarif 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19 dan 7226.99.99 sebagai berikut:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BAJA LAPIS ALUMINIUM SENG (BJLAS)
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM**

No	Negara Asal Barang	Eksportir Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1.	RRT	Guanxian Renze Composite Material Co., Ltd	10,05
		Shandong Evangel Material Co., Ltd.	7,40
		Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.	23,55
		Jiangyin Zongchen Steel Co., Ltd	7,20
		Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd.	3,07
		Huimin Wanshun Energy Saving New Material Co., Ltd	3,78
		Eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya	55,43
		2.	Vietnam
Hoa Sen Group	5,34		
Maruichi Sun Steel Joint Stock Company	18,30		
Southern Steel Sheet Co., Ltd.	49,20		
Ton Dong A Corporation	3,01		
Tan Phuoc Khanh	7,29		
Tay Nam Steel Manufacturing and Trading Co., Ltd.	11,75		
Vina One Steel Manufacturer	11,75		
Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya	49,20		

100. Pengenaan BMAD diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

Februari 2021
Komite Anti Dumping Indonesia